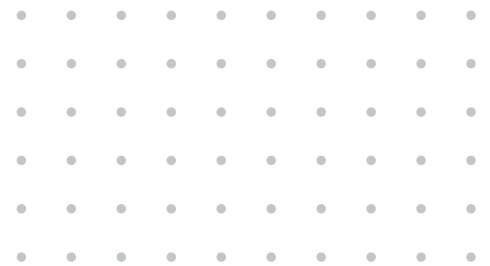


Laporan Refleksi dan Pembelajaran

Penelitian Aksi Partisipatif di
Halmahera Tengah, Maluku
Utara



Dala Institute

30 Januari 2026



Catatan:

Laporan ini merupakan bagian dari Penelitian Aksi Partisipatoris (PAR) yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Halmahera Tengah di tengah hilirisasi nikel. Penelitian ini mencakup studi kasus pada 3 klaster desa yang terdampak pertambangan nikel, dengan dua keluaran utama: (i) laporan substansi yang memuat temuan empiris berdasarkan pertanyaan penelitian yang disusun bersama Pemerintah Daerah, dan (ii) laporan refleksi dan pembelajaran yang mendokumentasikan proses partisipatoris serta pengaruhnya terhadap hubungan, kepercayaan, dan dinamika kekuasaan.

Laporan ini secara khusus menyajikan **temuan, refleksi, dan pembelajaran** dari tiga fase pertama (dari total lima fase) penelitian yang direncanakan berlangsung pada periode 2025–2026.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	1
Latar Belakang.....	1
Kerangka Konseptual.....	2
Tujuan dan Pertanyaan Pembelajaran.....	3
Metodologi.....	4
Pendekatan Analisis.....	4
Sumber Data.....	5
Teknik Koding dan Analisis Tematik.....	5
Gambaran Proses dan Temuan Tiap Fase.....	7
Fase 1: Penjajakan dan Pembangunan Hubungan.....	7
Aktivitas.....	7
Luaran.....	8
Temuan.....	8
Fase 2: Penyusunan Desain Penelitian Bersama.....	9
Aktivitas.....	10
Luaran.....	10
Temuan.....	10
Fase 3: Pengumpulan Data dan Analisis Situasi Kolaboratif.....	12
Aktivitas.....	12
Luaran.....	13
Temuan.....	13
Refleksi dan Pembelajaran Lintas Fase.....	18
4.1 Tantangan Mendasar dan Peluang dalam Proses Partisipatoris.....	18
4.2 Partisipasi dan Kemauan Pemerintah: antara Keterlibatan Awal, Kesadaran yang Tumbuh, dan Batas Kepemilikan Proses.....	20
4.3 Relevansi terhadap Kebutuhan Nyata Masyarakat: dari asumsi kebijakan ke pengalaman hidup warga.....	25
4.4 Pembelajaran Metodologis PAR: antara kualitas riset, kualitas partisipasi, dan realitas birokrasi.....	28
Implikasi ke Depan.....	30
Dokumentasi Kegiatan.....	32
Fase 1: Penjajakan dan Pembangunan Hubungan.....	32
Fase 2: Penyusunan Desain Penelitian Bersama.....	33
Fase 3: Pengumpulan Data dan Analisis Situasi Kolaboratif.....	34
Referensi.....	36

Pendahuluan

Latar Belakang

Agenda transisi energi membawa perubahan besar di berbagai daerah salah satunya di Maluku Utara. Sebagai pemilik cadangan nikel (mineral transisi) terbesar di Indonesia (Bappenas, 2025), Maluku Utara—terutama Pulau Halmahera—menjadi salah satu lokus ambisi global dan nasional terkait dengan hilirisasi nikel. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan nyata pada wewenang pengelolaan sumber daya mineral strategis oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan lokal utama. Pencanangan ambisi yang berada di pusat menyamarkan realita dan dinamika di tingkat lokal. Sementara kerangka kebijakan sering menggaungkan pertumbuhan ekonomi, suara serta pengalaman hidup masyarakat lokal kerap tidak tercermin secara memadai dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Lapaza & Azhar, 2025).

Pada praktiknya, ketimpangan ini menyebabkan perubahan yang begitu besar dan cepat pada kehidupan masyarakat. Pada pengumpulan data yang kami lakukan bersama interlokutor pemerintah daerah November 2025, komunitas menyampaikan perubahan drastis yang tidak dibayangkan sebelumnya pada kondisi fisik lingkungan, cara hidup, dan sosialisasi. Seperti banyak dipelajari sebelumnya, proses perumusan kebijakan yang bersifat *top-down* terbukti memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas tersebut, sehingga sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak selaras secara sosial (Prabawati et al., 2020).

Oleh karenanya, proyek ini mengeksplorasi pendekatan Penelitian Aksi Partisipatoris sebagai alternatif dari pendekatan konvensional selama ini. Proyek ini melengkapi penelitian yang ada sebelumnya, namun menempatkan pemangku kepentingan lokal (dalam proyek ini pemerintah daerah) sebagai produsen bersama pengetahuan dan sebagai partisipan aktif dalam membentuk perumusan masalah, penentuan prioritas, serta pengembangan respons kebijakan yang potensial. Pendekatan PAR diadopsi secara sengaja dalam proyek ini sebagai upaya untuk menjembatani pengetahuan, relasi kuasa, dan praktik.

Laporan ini mendokumentasikan refleksi dan pembelajaran dari tiga fase pertama proyek. Laporan ini tidak dimaksudkan sebagai uraian komprehensif mengenai seluruh aktivitas, melainkan sebagai narasi yang berorientasi pada pembelajaran, yang mengkaji bagaimana proses partisipatoris berlangsung dalam **praktik, tantangan dan trade-offs** yang muncul, serta bagaimana proses tersebut mulai memengaruhi keterlibatan dan relevansi kebijakan. Dengan membagikan refleksi ini secara terbuka, laporan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembelajaran yang lebih luas mengenai tata kelola partisipatoris dan pengelolaan mineral transisi yang berkeadilan, melampaui cakupan proyek ini.



Kerangka Konseptual

Proyek ini menggunakan Penelitian Aksi Partisipatoris (*Participatory Action Research*/PAR) sebagai pendekatan penelitian sekaligus proses pembelajaran kolektif dan pembangunan kapasitas. Pendekatan ini mengakar tidak hanya pada prosesnya yang partisipatif, tetapi juga iteratif dan relasional, di mana pengetahuan diproduksi secara bersama, relasi kuasa dinegosiasikan, dan pembelajaran yang berorientasi pada aksi berkembang seiring waktu (Stringer E., 2014). Oleh karenanya, elemen penting pada pendekatan ini adalah refleksi yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap proses untuk memahami tindakan yang dilakukan beserta dampaknya, sehingga memfasilitasi pembelajaran, memperdalam pengetahuan, serta mengarahkan perubahan yang diperlukan pada siklus penelitian (Hall et al. 2017).

Sejalan dengan desain proyek, PAR dilaksanakan secara kolaboratif bersama aktor pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Proses ini memfasilitasi saling berbagi dan belajar untuk secara bersama-sama mengungkap, memahami, dan merefleksikan tantangan-tantangan lokal terkait pengelolaan mineral transisi dan kebijakan pendukungnya. Sebagaimana ditekankan oleh Cornish dkk. (2023), PAR melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dari pihak-pihak yang menghadapi langsung persoalan yang diteliti, melalui keterlibatan dalam penelitian yang sistematis sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang bersifat emansipatoris. Dalam kerangka ini, Dala berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses penelitian partisipatoris guna menghasilkan keluaran yang merespons kebutuhan praktis serta kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang muncul dari aspirasi pemerintah dan komunitas terdampak.

Kerangka konseptual ini juga menantang pendekatan lama dan menegaskan bahwa tujuan penelitian partisipatoris tidak berhenti pada pengumpulan data, melainkan pada penguatan kapasitas lokal untuk menghasilkan pengetahuan dan memanfaatkannya bagi pembangunan dan perubahan sosial (Fals Borda, 1991). Berbeda dengan penelitian sosial konvensional—yang kerap menempatkan komunitas terdampak sebagai objek kajian pasif dan memonopoli pengetahuan yang dianggap sah di tangan akademisi atau lembaga eksternal—PAR berupaya mendemokratisasi produksi pengetahuan dengan mengakui, dalam proyek ini, institusi lokal sebagai pemilik pengetahuan yang sah sekaligus aktor perubahan.

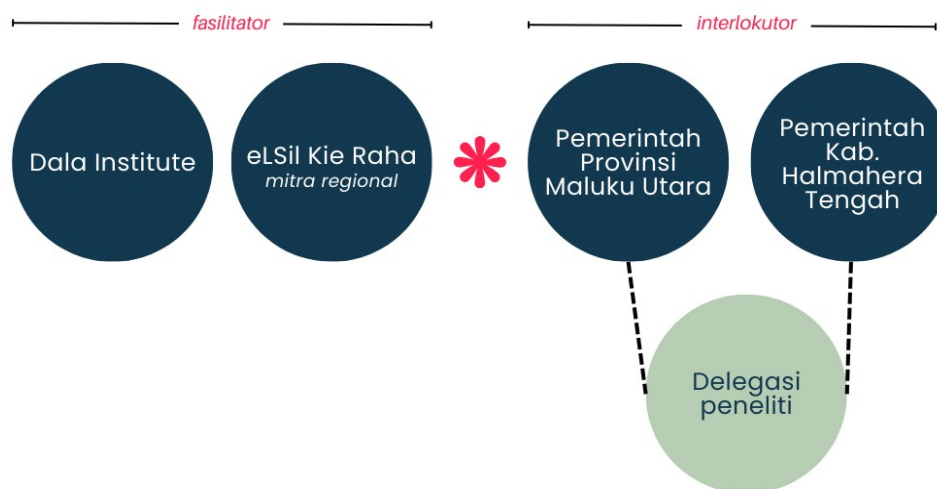
Secara metodologis, proyek ini menggunakan beragam pendekatan yang tidak berbeda dengan penelitian kualitatif pada umumnya yakni wawancara, diskusi terfokus dan dialog publik. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut didesain dan dilaksanakan secara partisipatif untuk menciptakan ruang deliberatif yang terstruktur. Metode-metode ini tidak diperlakukan sebagai instrumen yang kaku, melainkan sebagai mekanisme yang adaptif terhadap dinamika konteks dan temuan yang berkembang. Meskipun keluaran dan aktivitas spesifik dapat berubah seiring proses berjalan, proyek ini tetap menetapkan tujuan, pertanyaan refleksi, serta kerangka waktu yang jelas guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan akuntabilitas.



Secara konseptual, proses partisipatoris dalam proyek ini dipahami sebagai jalur pengaruh (*pathways of influence*), bukan sebagai pengungkit langsung perubahan kebijakan. Dalam konteks kebijakan yang kompleks seperti pengelolaan mineral transisi, perubahan jarang bersifat linier atau dapat diatribusikan pada satu intervensi tunggal. Sebaliknya, PAR diharapkan berkontribusi secara bertahap melalui pembentukan pemahaman bersama atas persoalan, peningkatan saling pengertian, serta penguatan relasi antar aktor pemerintah dan pemerintah dengan komunitas. Pergeseran-pergeseran ini, diharapkan menjadi fondasi bagi meningkatnya kemauan pemerintah untuk merespons suara komunitas dan bagi perumusan kebijakan yang lebih selaras dengan realitas lokal.

PAR menempatkan pembelajaran sebagai capaian utama dalam dirinya sendiri oleh sebab itu disusunlah laporan ini terpisah dari analisis substansi. Pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai akumulasi pengetahuan baru, tetapi juga sebagai perubahan dalam **cara pandang, kapasitas, dan praktik** para pihak yang terlibat seperti terlihat pada Gambar 1. Pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran ini secara langsung menjadi dasar bagi pertanyaan refleksi yang memandu laporan ini, yang mengkaji tantangan proses partisipatoris, pengaruhnya terhadap keterlibatan kebijakan, serta relevansi respons kebijakan yang muncul terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Gambar 1. Aktor yang terlibat dalam penelitian



Tujuan dan Pertanyaan Pembelajaran

Dengan berlandaskan pada pendekatan yang berorientasi pada refleksi dan pembelajaran, laporan ini disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kunci berikut:

1. Seberapa menantang proses partisipatoris dalam mendorong perubahan terkait isu energi dan kebijakan pendukungnya?



2. Bagaimana proses partisipatoris memengaruhi kemauan pemerintah untuk mengkomodasi atau merespons kebutuhan dan suara komunitas yang teridentifikasi dalam kebijakan dan programnya?
3. Seberapa relevan perubahan kebijakan yang dihasilkan terhadap kebutuhan nyata masyarakat lokal?

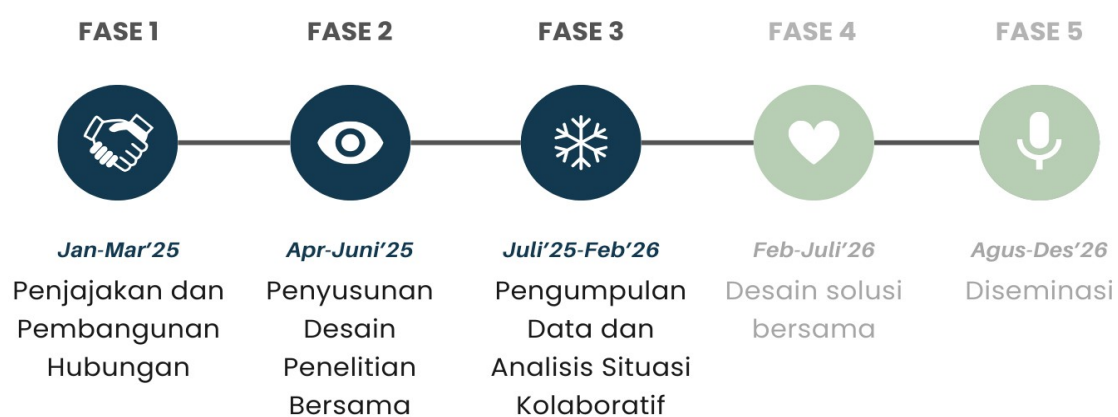
Secara keseluruhan, pertanyaan-pertanyaan pembelajaran ini menyediakan lensa yang terstruktur untuk merefleksikan capaian, keterbatasan, dan kontribusi dari proses partisipatoris selama tiga fase pertama proyek. Pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi dasar bagi pembelajaran adaptif dan pengambilan keputusan pada fase-fase selanjutnya dalam siklus penelitian-aksi.

Metodologi

Bagian metodologi ini menjelaskan bagaimana refleksi dan pembelajaran dalam laporan ini dikumpulkan, dianalisis, dan disintesis. Berbeda dari metodologi laporan substansi yang berfokus pada temuan empiris terkait kondisi sosial ekonomi, layanan dasar, program PPM/CSR, dan pascatambang, metodologi dalam laporan ini secara khusus dirancang untuk menangkap dinamika pelaksanaan Penelitian Aksi Partisipatoris (PAR) sebagai sebuah proses kolaboratif, reflektif, dan adaptif.

Meskipun demikian, laporan ini menyadari keterbatasan yang antara lain karena sebagian perubahan relasi dan kebijakan masih bersifat awal dan belum sepenuhnya terwujud pada fase yang dilaporkan (Lihat Gambar 2). Keterbatasan ini justru menjadi bagian dari pembelajaran yang akan digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pada fase-fase selanjutnya dari siklus penelitian-aksi.

Gambar 2. Tahapan PAR dan Cakupan Laporan



Pendekatan Analisis

Laporan refleksi dan pembelajaran ini menggunakan analisis kualitatif berbasis koding tematik terhadap berbagai sumber data proses. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara tim peneliti, pemerintah daerah, mitra lokal, dan



masyarakat berkembang sepanjang siklus aksi-refleksi, serta bagaimana konteks sosial dan politik memengaruhi jalannya proses penelitian.

Koding tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak secara kuantitatif, melainkan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, ketegangan, dan pembelajaran kunci yang muncul selama pelaksanaan tiga fase awal PAR, mulai dari pembentukan relasi hingga tahap pengumpulan data.

Sumber Data

Refleksi dan pembelajaran dalam laporan ini bersumber dari berbagai bentuk dokumentasi proses, antara lain:

- catatan refleksi rutin yang disusun oleh peneliti internal (Dala Institute dan eLSiL Kie Raha),
- notulensi rapat dan diskusi dengan interlokutor pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk Kepala Dinas/Badan, Kepala Bidang, dan staf teknis,
- formulir refleksi yang diisi selama proses pengumpulan data dan kegiatan partisipatif,
- komunikasi dan catatan informal yang relevan dengan proses penelitian, seperti diskusi melalui kanal WhatsApp dan *diaries*.

Pendekatan multi-sumber ini memungkinkan triangulasi refleksi dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika proses PAR.

Tiga klaster desa dalam penelitian ini mencakup:

1. Klaster 1. Desa Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai
2. Klaster 2. Desa Kobe dan Sawai Itepo
3. Klaster 3. Desa Fidi Jaya

Teknik Koding dan Analisis Tematik

Proses koding dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk menangkap dinamika utama dalam pelaksanaan PAR. Kategori koding dikembangkan untuk merepresentasikan dimensi-dimensi kunci dari proses partisipatif, antara lain:

Tabel 1. Koding deskripsi

Kode	Penjelasan Penggunaan
P1. strategi_engagement	Untuk mencatat strategi dan pendekatan yang digunakan dalam membangun keterlibatan (misalnya: lewat tokoh masyarakat, pendekatan informal, atau forum resmi) dan efektivitasnya. Termasuk gaya komunikasi yang digunakan.
P2. partisipasi_dinamika	Untuk menangkap pola partisipasi selama proses PAR—siapa yang aktif, siapa yang tertinggal, bagaimana kepercayaan dan relasi antaraktor (masyarakat,



Kode	Penjelasan Penggunaan
	pemda, peneliti).
P3. kekuasaan_relasi	Untuk mengidentifikasi dinamika kekuasaan dan pengaruh antaraktor (mis. ketimpangan peran antara pemda–masyarakat, CSO–perusahaan, donor–pelaksana). Termasuk bagaimana pemda menempatkan diri.
P4. kejutan_pembelajaran	Untuk merekam hal-hal tak terduga (positif maupun tantangan) yang muncul selama proses, serta pembelajaran yang diperoleh seperti menyadari sesuatu yang baru (akar masalah atau ide solutif), dan perbedaan persepsi atau pengetahuan yang mencolok.
P5. refleksi_PAR	Untuk mencatat proses refleksi dan pembelajaran internal tim peneliti/mitra dan pemda terkait metodologi (kekuatan dan tantangan PAR),
P6. eksternal_pengaruh	Untuk menangkap pengaruh konteks politik, sosial, dan kebijakan lokal terhadap efektivitas proses partisipatif (misalnya, dukungan atau resistensi dari pemda).

Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan menelusuri keterkaitan antar-kategori koding, serta mengaitkannya dengan pertanyaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses ini memungkinkan laporan untuk tidak hanya menggambarkan *apa yang dilakukan*, tetapi juga *bagaimana* dan *mengapa* proses tersebut membentuk kapasitas, relasi, dan strategi para pihak yang terlibat.

Proses koding dekskripsi dan koding tema dilakukan secara manual menggunakan *software* Dedoose untuk menghindari bias dan memastikan kerahasiaan data (termasuk pelepasan atribusi informasi). Namun, dalam tahap sintesis dan penajaman analisis tematik, peneliti menggunakan dukungan *Artificial Intelligence* sebagai alat bantu analitik untuk mengidentifikasi pola lintas-kategori, menguji koherensi temuan, dan memperkuat refleksi terhadap pertanyaan pembelajaran.

Sejalan dengan prinsip PAR, refleksi dalam laporan ini bersifat *situated dan relational*, dipengaruhi oleh posisi dan peran para aktor yang terlibat dalam proses. Oleh karena itu, temuan dalam laporan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan untuk memberikan pembelajaran kontekstual yang relevan bagi pengembangan praktik partisipatoris dan keterlibatan kebijakan di wilayah pertambangan.



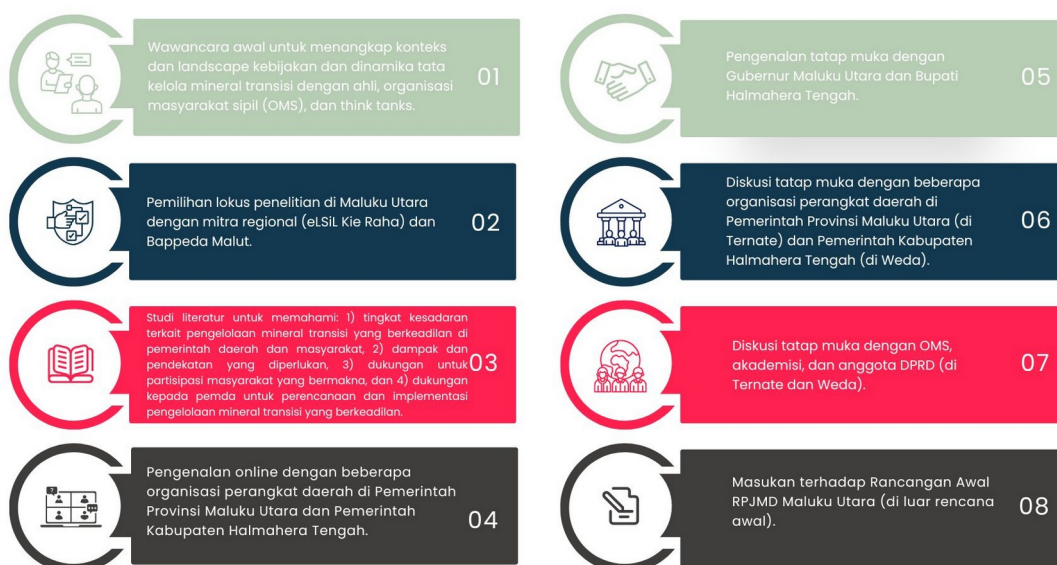
Gambaran Proses dan Temuan Tiap Fase

Bagian ini menjabarkan kegiatan setiap fase pada tiga fase pertama PAR. Di dalamnya mencakup kegiatan yang dilakukan, luaran yang dihasilkan, serta temuan, refleksi, dan pembelajaran. Dalam laporan ini, temuan mencatat apa yang terjadi selama pelaksanaan setiap fase, termasuk pola dan dinamika yang muncul, tanpa menarik kesimpulan atau pembelajaran lintas fase. Analisis dan refleksi atas temuan tersebut disajikan secara terpisah pada bab selanjutnya.

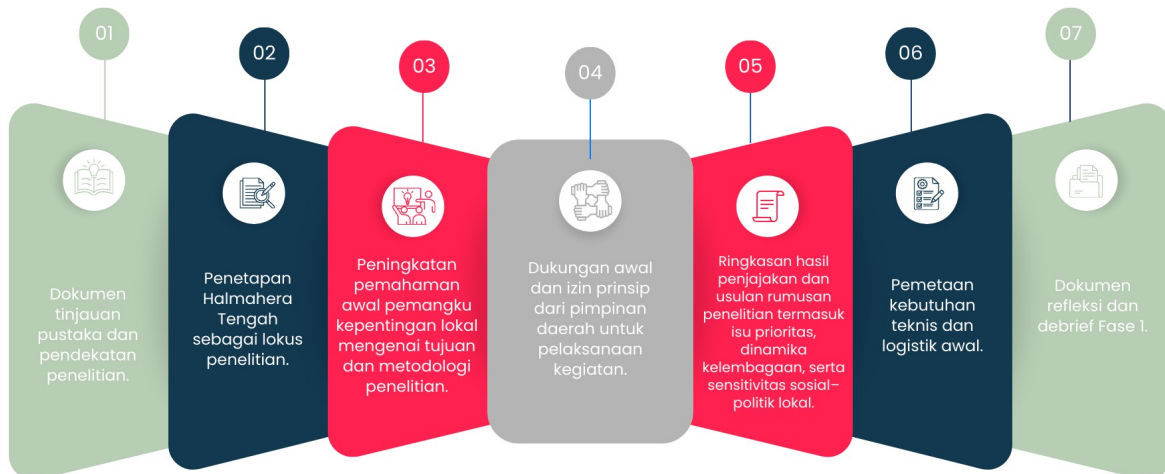
Fase 1: Penjajakan dan Pembangunan Hubungan

Fase 1 merupakan tahap awal penelitian yang berfokus pada pendalaman konteks dan pembangunan hubungan dengan aktor kunci di tingkat daerah. Fase ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai isu yang akan dikaji, memperkenalkan pendekatan penelitian, serta memperoleh dukungan awal untuk pelaksanaan kegiatan di fase selanjutnya. Aktor utama yang terlibat meliputi mitra regional, kepala daerah, serta pimpinan beberapa OPD di tingkat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Aktivitas



Luaran



Temuan

Strategi *engagement* dan konteks awal proses partisipatoris

Pada fase penjajakan, proses partisipatoris dimulai melalui *engagement* awal dengan pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah, menggunakan kombinasi pendekatan formal dan informal. Pendekatan ini dimungkinkan atas peran mitra regional yang memiliki pengalaman dan jejaring kuat dengan *stakeholder* lokal. Diskusi dilakukan secara daring dan tatap muka, dengan variasi format, tingkat formalitas, serta alur komunikasi yang menyesuaikan dengan struktur birokrasi dan agenda aktor yang terlibat. Penyesuaian ini mencerminkan kondisi awal di mana isu transisi energi dan pengelolaan mineral transisi belum menjadi diskursus yang mapan di tingkat daerah.

Dalam proses tersebut, narasi dan fokus isu proyek mengalami pergeseran. Diskusi awal dengan pemerintah provinsi menunjukkan pemahaman transisi energi yang masih sangat erat dengan energi baru dan terbarukan (EBT) padahal penelitian ini dimaksudkan membahas dampak dan distribusi manfaat sebagai daerah penghasil mineral yang mendukung agenda transisi energi. Pada diskusi selanjutnya dengan pemerintah kabupaten, fokus komunikasi bergeser untuk secara lebih eksplisit mencakup pengelolaan mineral transisi dan isu pasca tambang. Pergeseran fokus ini muncul seiring dengan upaya menyesuaikan bahasa dan isu agar lebih kontekstual dengan pengalaman daerah penghasil nikel dimana pengalaman Pulau Gebe berulang kali disebutkan. Narasi ini menjadi pemantik pengalaman kolektif dan titik masuk kesadaran bersama akan pentingnya koordinasi lintas sektor.

Dinamika partisipasi dan respon kelembagaan pemerintah daerah

Respons pemerintah daerah terhadap pertanyaan mengenai kebutuhan dan isu prioritas menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan struktur organisasi perangkat daerah dan tugas pokok masing-masing OPD. Diskusi awal lebih banyak berfungsi sebagai ruang klarifikasi posisi, kewenangan, dan sensitivitas politik, dibandingkan sebagai forum refleksi lintas sektor.



Fragmentasi respons pada fase ini belum dipersepsikan sebagai persoalan, melainkan sebagai konsekuensi wajar dari struktur birokrasi yang berjenjang. Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan relevansi isu dengan agenda pembangunan, legitimasi proses, serta kejelasan posisi kelembagaan dalam konteks kewenangan pusat-daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam diskusi juga dipengaruhi oleh mekanisme formal pemerintahan. Proses *engagement* mengikuti jalur birokrasi yang berjenjang, termasuk kebutuhan akan dukungan dan arahan dari pimpinan daerah. Dukungan pimpinan daerah menjadi bagian dari konteks yang memengaruhi keterlibatan OPD teknis dalam proses awal, serta menentukan ruang dan format diskusi yang dapat dilakukan.

Relasi kekuasaan dan pembagian kewenangan dalam isu energi dan pertambangan

Interaksi pada fase penjajakan memperlihatkan pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang membentuk batasan awal ruang gerak pemerintah daerah. Dalam diskusi dengan OPD, terdapat rujukan berulang pada keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan dan energi, khususnya terkait perizinan, pengawasan, dan kebijakan strategis yang berada di tingkat pusat.

Kondisi ini menjadi bagian dari konteks awal yang menyertai proses partisipatoris, di mana pemerintah daerah berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan perencanaan, namun dengan ruang pengambilan keputusan yang terbatas pada kebijakan tertentu. Dinamika ini membingkai bagaimana isu, kebutuhan, dan aspirasi dapat muncul dan dibahas dalam proses awal.

Informasi awal dan isu yang teridentifikasi

Fase penjajakan menghasilkan beragam informasi awal mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah, serta perbedaan pemahaman antaraktor terkait pengelolaan mineral transisi. Diskusi juga memunculkan isu keterbatasan akses informasi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun komunitas, sebagai bagian dari konteks awal pengelolaan sektor pertambangan dan energi.

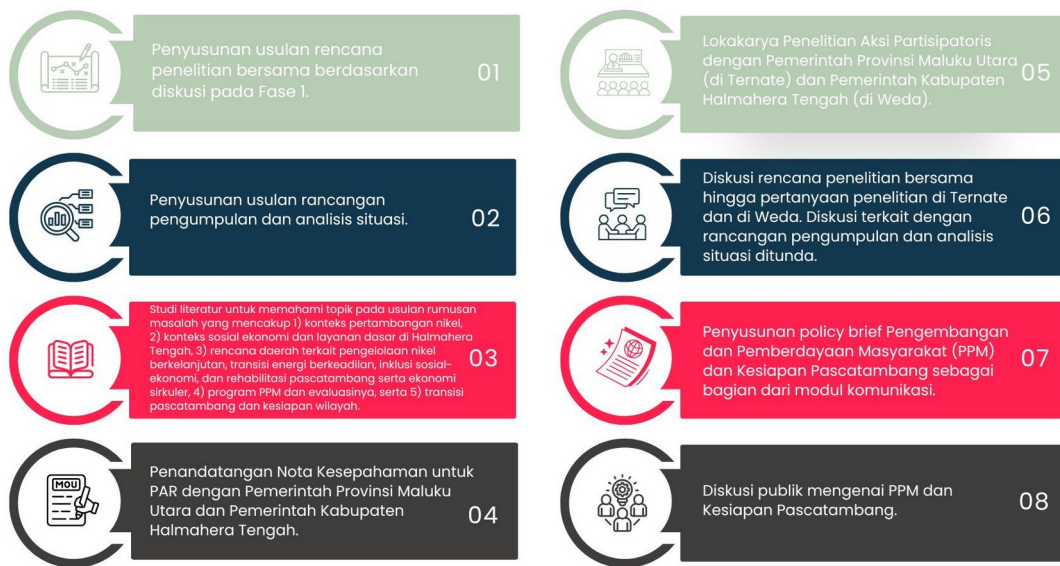
Informasi-informasi ini belum membentuk arah kebijakan atau perubahan program, namun menjadi bagian dari gambaran awal mengenai isu, kebutuhan, dan tantangan yang ada di tingkat lokal, serta bagaimana isu-isu tersebut dipersepsikan oleh berbagai aktor.

Fase 2: Penyusunan Desain Penelitian Bersama

Fase 2 mencakup pendalaman konteks melalui studi literatur dan penyusunan desain penelitian, serta *engagement* awal untuk membangun kesepahaman, komitmen, dan kepercayaan dalam pelaksanaan PAR. Aktor utama yang terlibat pada fase ini ialah mitra regional dan pimpinan OPD di tingkat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.



Aktivitas



Luaran



Temuan

Strategi engagement dalam perumusan rencana penelitian partisipatoris

Pada fase perumusan rencana penelitian, proses partisipatoris diperluas melalui lokakarya PAR, diskusi teknis lanjutan, serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten (kepala dinas dan kepala bidang). *Engagement* dilakukan dengan memadukan pendekatan formal—melalui lokakarya resmi, diskusi lintas OPD, dan penandatanganan Nota Kesepahaman—serta pendekatan informal melalui komunikasi



personal. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan dengan struktur birokrasi, ketersediaan waktu aktor, serta dinamika agenda pemerintahan daerah.

Proses perumusan rencana penelitian menunjukkan bahwa penyelarasan isu penelitian dengan kebutuhan pemerintah daerah berlangsung secara bertahap. Menyadari keterbatasan kewenangan yang dimiliki, diskusi mengarah pada topik yang dipandang lebih dekat dengan mandat dan kepentingan OPD seperti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan kesiapan pascatambang. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai peserta diskusi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan fokus isu, ruang lingkup penelitian, serta bentuk luaran yang dinilai relevan dengan proses perencanaan dan kebijakan daerah.

Dinamika partisipasi OPD dan kapasitas kelembagaan

Diskusi lintas OPD memperlihatkan bahwa isu penelitian cenderung direspons melalui lensa sektoral. Artikulasi kebutuhan dan permasalahan banyak dikaitkan dengan mandat masing-masing OPD, sementara pembahasan lintas sektor muncul secara terbatas dan lebih dominan dalam forum yang melibatkan aktor perencanaan. Kondisi ini membentuk pola partisipasi awal yang masih terfragmentasi, meskipun terdapat upaya untuk mendorong diskusi mengenai isu yang bersifat multidimensi. Meskipun demikian, fragmentasi ini tereduksi oleh narasi pengalaman bersama pada Pulau Gebe dan aspirasi untuk persiapan pascatambang yang lebih baik.

Relasi kekuasaan dan kepemilikan proses penelitian

Proses perumusan rencana penelitian juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan perbedaan level jabatan dalam struktur pemerintahan. Keterlibatan pimpinan OPD dan pejabat struktural berperan penting dalam membuka ruang diskusi dan memberikan legitimasi terhadap proses yang berlangsung.

Fase ini menjadi persiapan fase berikutnya untuk pengumpulan data dimana pimpinan OPD menyepakati keterlibatan delegasi peneliti yang ditunjuk oleh masing-masing OPD. Peralihan keterlibatan dari level pimpinan ke level pelaksana (staf maupun pegawai kontrak) turut memengaruhi kesinambungan informasi dan pemahaman mengenai tujuan serta pendekatan penelitian (Lihat Gambar 3). Dalam beberapa kasus, hal ini menciptakan jarak antara proses perumusan masalah di tingkat kebijakan dan keterlibatan teknis dalam tahapan penelitian selanjutnya.

Gambar 3. Jenjang keterlibatan



Pengaruh konteks eksternal terhadap proses partisipatoris

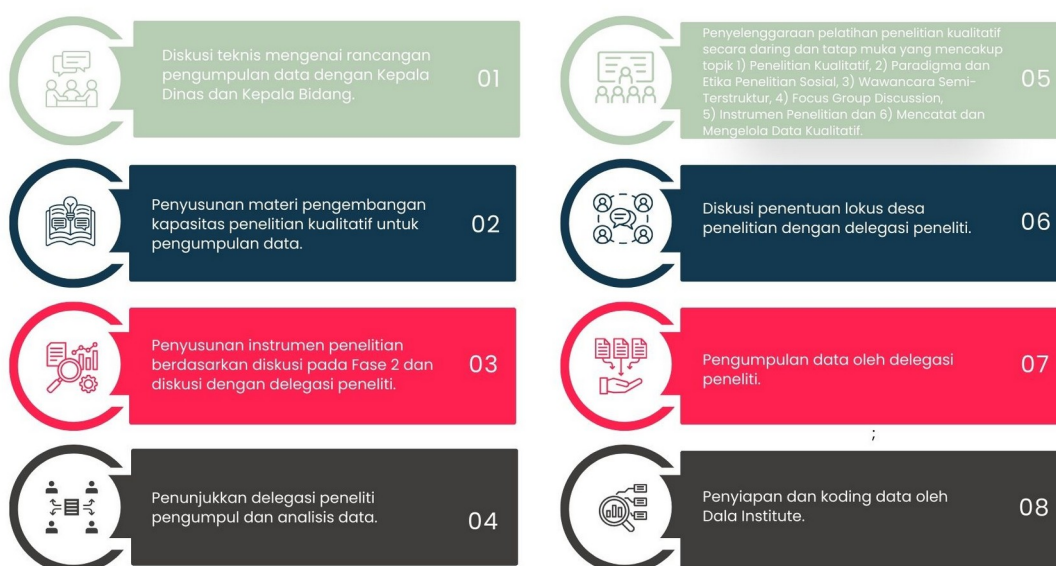
Pelaksanaan fase perumusan rencana penelitian berlangsung dalam konteks dinamika politik dan birokrasi daerah pasca pelantikan Kepala Daerah. Agenda pemerintahan, rotasi pejabat, serta perkembangan isu di tingkat daerah dan nasional memengaruhi ritme partisipasi dan pengambilan keputusan. Kekhawatiran yang dipicu oleh pengalaman dan persepsi terhadap penelitian lain yang sebelumnya berlangsung di wilayah ini turut memengaruhi sikap sebagian aktor pemerintah daerah. Dalam beberapa diskusi awal, muncul kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap arah serta implikasi penelitian, khususnya ketika metodologi dan fokus kajian dianggap berpotensi sensitif. Selain itu, faktor logistik dan aksesibilitas—termasuk kondisi cuaca, transportasi, dan infrastruktur—turut membentuk pelaksanaan kegiatan dan pengaturan pertemuan pada fase ini.

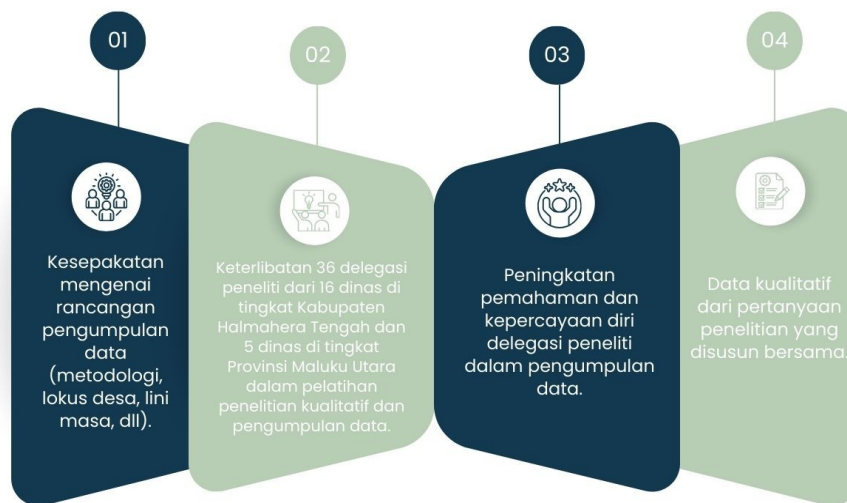
Konteks eksternal tersebut menjadi bagian dari situasi yang menyertai proses partisipatoris, memengaruhi keberlanjutan keterlibatan aktor serta ruang diskusi yang dapat dibangun selama fase perumusan rencana penelitian.

Fase 3: Pengumpulan Data dan Analisis Situasi Kolaboratif

Fase 3 berfokus pada penguatan kapasitas praktis serta implementasi pengumpulan data melalui pendekatan PAR. Pada fase ini, proses diarahkan untuk menerjemahkan desain penelitian yang telah disepakati ke dalam praktik lapangan melalui pelatihan, pendampingan, dan keterlibatan langsung delegasi peneliti dari pemerintah daerah. Aktor utama yang terlibat pada fase ini ialah delegasi peneliti dari organisasi perangkat daerah di tingkat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah, dengan pendampingan dari mitra regional dan tim peneliti Dala Institute.

Aktivitas





Temuan

Sub-fase 3.1 Pelatihan Online: kesiapan awal, legitimasi proses, dan batas partisipasi daring

Pada sub-fase pelatihan daring, proses partisipatoris berfungsi terutama sebagai mekanisme awal untuk membangun legitimasi kelembagaan dan memperkenalkan tujuan serta pendekatan penelitian kepada delegasi peneliti yang ditunjuk oleh pimpinan OPD. Keterlibatan pemerintah daerah pada tahap ini menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap agenda penelitian, namun tingkat partisipasi substantif masih terbatas. Kehadiran peserta relatif tinggi, tetapi interaksi aktif, diskusi kritis, dan klarifikasi metodologis berlangsung secara terbatas.

Dinamika partisipasi memperlihatkan variasi keterlibatan yang dipengaruhi oleh posisi jabatan, keberadaan motivasi intrinsik, serta akses dan kemudahan terlibat di ruang virtual (teknologi, akses listrik dan internet). Peserta dengan motivasi intrinsik seperti keinginan untuk belajar pendekatan kualitatif, mendengar langsung keluhan masyarakat, serta paparan terhadap dampak, cenderung lebih berkontribusi secara aktif. Di sisi lain, peserta dengan jabatan lebih rendah cenderung pasif, terutama ketika pejabat senior hadir dalam ruang yang sama.

Dalam konteks relasi kuasa dan struktur birokrasi, pelatihan daring juga menunjukkan bahwa pendekatan penelitian partisipatoris bagi sebagian masih dipersepsikan sebagai aktivitas tambahan di luar tugas utama. Persepsi ini memengaruhi komitmen waktu dan kesiapan mengikuti materi secara mendalam. Namun dorongan dari pimpinan mempengaruhi partisipasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal, proses partisipatoris menghadapi tantangan struktural dalam mendorong keterlibatan bermakna ketika medium daring menjadi kanal utama pembelajaran dan koordinasi.



Sub-fase 3.2 Pelatihan Tatap Muka: penguatan kapasitas praktis dan dinamika internal partisipasi

Pelatihan tatap muka menjadi titik transisi penting dari pengenalan konseptual menuju praktik partisipatoris. Interaksi langsung memungkinkan peserta memahami metode PAR secara lebih konkret, termasuk peran fasilitator, pewawancara, dan pencatat. Simulasi dan diskusi kelompok membuka ruang bagi peserta untuk mencoba peran-peran tersebut sekaligus memperlihatkan variasi kapasitas antarindividu. Meskipun pada fase pelatihan daring sebelumnya partisipasi menghadapi berbagai kendala, kehadiran dan interaksi aktif pada pelatihan tatap muka justru relatif tinggi. Dari sekitar 40 staf OPD yang didelegasikan sejak awal, dua orang mengundurkan diri pada fase daring karena sakit dan hanya dua orang yang izin pada pelatihan tatap muka, sehingga pelatihan diikuti oleh 36 peserta. Tingkat kehadiran ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang cukup kuat ketika ruang pembelajaran dilakukan secara langsung.

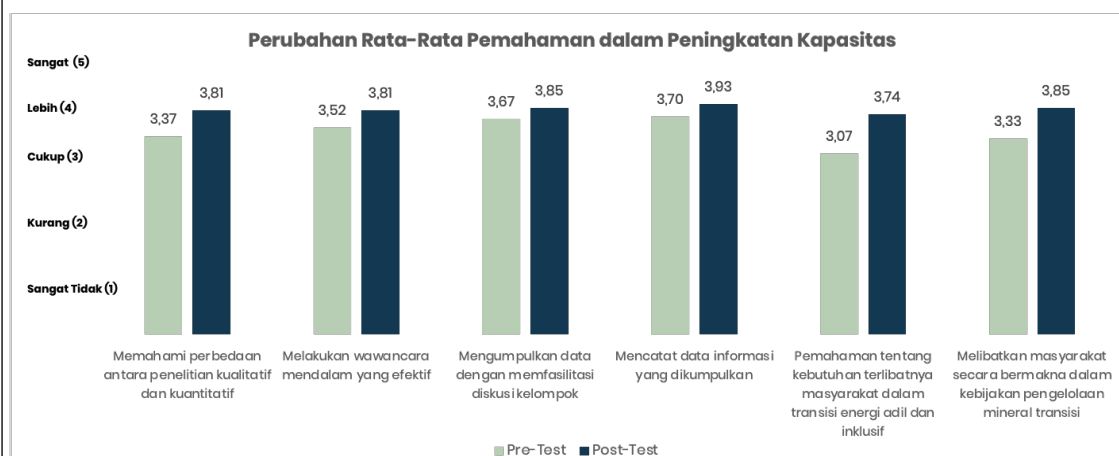
Temuan menunjukkan bahwa dinamika partisipasi pada pelatihan tatap muka sangat dipengaruhi oleh latar belakang peserta, pengalaman sebelumnya dengan penelitian kualitatif, serta posisi jabatan. Sebagian peserta mampu beradaptasi dengan cepat dan mulai membedakan antara klarifikasi program dan eksplorasi pengalaman warga. Namun, sebagian lainnya masih menunjukkan pendekatan yang kaku, sangat bergantung pada panduan tertulis, dan belum terbiasa melakukan *probing* atau mendengarkan secara mendalam yang penting pada penelitian kualitatif.

Relasi kuasa terlihat dalam pembagian peran selama pelatihan. Peserta dengan jabatan lebih senior cenderung memimpin simulasi, sementara peserta junior lebih sering berperan sebagai pencatat. Upaya rotasi peran dilakukan, tetapi tidak selalu berhasil menyeimbangkan kontribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipatif dibuka, hierarki organisasi tetap memengaruhi praktik partisipasi. Di tengah kendala struktural karena kebiasaan berjenjang, desain metodologi pelatihan yang menuntut kerja kelompok, simulasi bergilir, dan diskusi bersama secara bertahap mendorong interaksi antarpeserta, sehingga kepercayaan diri dan keterbukaan mulai tumbuh selama sesi berlangsung.

Secara keseluruhan, pelatihan tatap muka memperlihatkan bahwa proses partisipatoris mulai membangun kapasitas dan kesiapan praktis, sekaligus menyingkap keterbatasan struktural dan kultural yang berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi pada tahap pengumpulan data.



Kotak 1. Perubahan kapasitas dan pandangan delegasi peneliti dalam penelitian kualitatif



Efek dari peningkatan kapasitas diamati dengan melihat garis dasar (*baseline*) persepsi pemahaman peserta mengenai topik pelatihan kemudian dibandingkan dengan hasil sesudah menjalani pelatihan. Berdasarkan perbandingan keduanya yang diambil dari sampel sejumlah 27 dari total 36 peserta, terlihat adanya kenaikan tingkat kepercayaan (persepsi terhadap pemahaman) sebesar 0,23 – 0,65 poin persentase. Peningkatan paling tinggi terjadi pada aspek pemahaman tentang kebutuhan terlintas masyarakat dalam transisi energi adil dan inklusif.

Beberapa kutipan yang diambil dari hasil survei post-test kegiatan peningkatan kapasitas, di antaranya:

“Sangatlah berkesan karna dari kegiatan ini kami akan lebih memahami bagaimana cara penelitian kualitatif”

“Banyak hal yang dapat dipelajari dari pelatihan online maupun offline seperti materi materi baru yang sebelumnya belum pernah didegar seperti tentang PPM/CSR, fasilitator yang kooperatif, metode pelatihan yang aktif, menyenangkan dan sangat banyak ilmu yang diperoleh”

		Setelah menjalani pelatihan penelitian kualitatif, bagaimana kesiapan Anda melakukan penelitian kualitatif mendatang?			
Apakah Anda sudah pernah melakukan penelitian kualitatif sebelumnya?	N	Belum siap, tetapi akan membantu selama kegiatan	Kurang siap dan perlu praktik langsung di lapangan sambil mengobservasi	Cukup siap melakukan penelitian, namun masih butuh bimbingan	Sangat siap melakukan kegiatan penelitian
Ya, sudah pernah dan masih familiar dengan prosesnya	2	0	0	1 (50%)	1 (50%)
Ragu (Tidak ingat / Pernah, namun sudah sangat lama)	5	0	0	4 (80%)	1 (20%)
Belum pernah melakukan sama sekali	20	0	2 (10%)	9 (45%)	9 (45%)

Selain peningkatan persepsi pemahaman topik pelatihan, kesiapan peserta dalam melaksanakan praktik penelitian terkait dengan pengalaman peserta pelatihan terhadap penelitian kualitatif. Pada tabel di atas dapat dilihat peserta yang terpapar (sudah pernah atau ragu namun sudah pernah) seluruhnya menyatakan kesiapannya meski sebagian besar diantaranya membutuhkan bimbingan. Pada peserta yang belum pernah melakukan penelitian kualitatif, pelatihan mendorong kesiapan sebagian besar peserta (90%) dengan dua (10%) menyatakan kurang siap. Dapat dilihat bahwa sebagian besar (20 dari 27 sampel) belum pernah melakukan penelitian kualitatif sama sekali yang menjadi tantangan dan pertimbangan dalam proses penelitian ini.



Sub-fase 3.3 Pengumpulan Data di Masyarakat: uji lapangan proses partisipatoris dan relevansinya terhadap kebutuhan lokal

Tahap pengumpulan data di masyarakat menjadi arena utama untuk menguji bagaimana proses partisipatoris bekerja dalam konteks nyata. Metode FGD dan wawancara memungkinkan warga menyampaikan pengalaman langsung terkait dampak pertambangan, layanan dasar, konflik lahan, serta ketergantungan ekonomi. Isu-isu tertentu—terutama lahan, air bersih, dan bantuan yang tidak merata—muncul sebagai pemantik diskusi yang kuat dan emosional, khususnya di kalangan perempuan dan kelompok rentan.

Namun, temuan menunjukkan bahwa dinamika partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa di tingkat lokal. Kehadiran aparat desa, tokoh adat, atau *gatekeeper* tertentu membatasi keluasan ekspresi warga. Ketakutan untuk berbicara, dominasi oleh individu tertentu, serta kecenderungan menyensor diri muncul berulang kali, terutama ketika diskusi menyentuh isu sensitif atau menyangkut tanggung jawab pemerintah desa dan perusahaan.

Dinamika partisipasi juga terlihat di dalam tim interlokutor. Perbedaan kapasitas, pengalaman, dan jabatan memengaruhi cara wawancara dan FGD difasilitasi. Pada sebagian kelompok, interlokutor masih cenderung mengklarifikasi atau menjelaskan program, sementara pada kelompok lain mulai terlihat pergeseran menuju praktik mendengarkan dan *probing* yang lebih konsisten. Seiring berjalannya waktu, beberapa interlokutor menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai representasi institusi.

Dari sisi relasi kekuasaan, warga sering memposisikan interlokutor sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau pihak pengambil keputusan, meskipun posisi mereka telah dijelaskan sebagai peneliti. Persepsi ini memengaruhi cara warga menyampaikan informasi dan memperkuat kehati-hatian dalam berbicara. Dalam konteks ini, proses partisipatoris beroperasi di dalam jaringan relasi kuasa yang sudah ada dan tidak sepenuhnya netral.

Pengumpulan data juga mengungkap bahwa sejumlah isu kebijakan yang sebelumnya dianggap telah dipahami oleh pemerintah memiliki dimensi pengalaman yang berbeda di tingkat masyarakat. Kekhawatiran terhadap fase pascatambang mulai terartikulasikan ketika warga diminta merefleksikan keberlanjutan penghidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipatoris membuka ruang artikulasi kebutuhan yang sebelumnya tidak sepenuhnya hadir dalam diskursus kebijakan.

Kotak 2. Kejutan pembelajaran oleh delegasi peneliti

Pengumpulan data di masyarakat memunculkan sejumlah temuan tidak terduga bagi delegasi peneliti yang terlibat langsung. Mendengar dan menyaksikan kondisi warga secara langsung menantang asumsi awal yang sebelumnya dibangun melalui data administratif dan diskusi kebijakan. Beberapa delegasi menyatakan keterkejutan terhadap kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kondisi layanan dasar di desa-desa lingkaran tambang. Seorang delegasi berefleksi bahwa *“masyarakat membeli air galon hingga 21 galon per dua minggu untuk kebutuhan memasak dan minum, padahal daerah ini dikenal memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.”* Temuan ini menggeser pemahaman awal bahwa persoalan utama warga semata-mata berkaitan dengan sikap atau perilaku, menjadi pengakuan atas keterbatasan struktural layanan dasar.



Kejutan pembelajaran juga muncul ketika delegasi menyadari bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap pascatambang bukan karena apatisme, melainkan karena minimnya informasi dan ruang dialog. Seorang interlokutor mengungkapkan bahwa *“selama ini pemerintah mengira warga belum peduli pascatambang, tetapi setelah mendengar langsung, terlihat bahwa kebingungan warga justru muncul karena tidak pernah diajak bicara atau diberi gambaran.”* Dalam beberapa diskusi, pertanyaan tentang pascatambang memicu refleksi mendalam, terutama di kalangan pekerja tambang, pedagang, maupun ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa tambang akan berhenti beroperasi.

Selain itu, keterlibatan langsung di lapangan membuat delegasi peneliti menyadari bahwa ketimpangan penerima bantuan dan informasi—terutama antara kelompok yang memiliki kedekatan dengan aparat desa dan staf pemerintah daerah—merupakan isu sentral yang memperlemah kepercayaan publik. Seorang delegasi menyatakan bahwa *“selama ini di kantor kami tahu bantuan sering tidak merata, tetapi di lapangan terlihat bahwa ini bukan kasus terisolasi, melainkan pola yang memicu kecemburuan dan ketakutan warga untuk berbicara.”* Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa proses partisipatoris tidak hanya menghasilkan data substantif, tetapi juga memicu pergeseran cara pandang aparatur terhadap akar persoalan dan relevansi kebijakan yang selama ini dianggap memadai.



Refleksi dan Pembelajaran Lintas Fase

4.1 Tantangan Mendasar dan Peluang dalam Proses Partisipatoris

Proses partisipatoris pada tiga fase awal penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi bukanlah kondisi yang hadir secara otomatis ketika ruang dibuka, melainkan proses sosial dan politik yang dibentuk oleh konteks, relasi kuasa, serta tingkat kepercayaan antar aktor. Tantangan utama dalam mendorong partisipasi bermakna tidak semata terletak pada kapasitas teknis atau metode penelitian yang digunakan, tetapi pada fakta bahwa proses ini beroperasi di dalam struktur birokrasi dan tata kelola yang telah mapan, dengan hierarki, norma, dan kepentingan yang menyertainya. Tantangan ini semakin nyata di wilayah pertambangan dimana berbagai kepentingan mempengaruhi ruang dan pola hidup masyarakat yang ada didalamnya.

Salah satu tantangan mendasar adalah asumsi awal bahwa keterlibatan aktor dalam forum atau pelatihan sudah mencerminkan partisipasi substantif. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran formal—terutama dalam ruang daring—tidak selalu berbanding lurus dengan keterlibatan reflektif, diskusi kritis, atau kepemilikan terhadap proses. **Medium dan cara pelibatan sangat menentukan kualitas partisipasi.** Pelatihan dan diskusi daring berfungsi penting sebagai mekanisme awal untuk membangun legitimasi kelembagaan dan penyampaian kerangka penelitian, namun relatif terbatas dalam menciptakan interaksi yang setara dan aman bagi peserta dengan posisi jabatan lebih rendah.

Sebaliknya, pertemuan tatap muka dan keterlibatan langsung di lapangan membuka peluang partisipasi yang lebih cair. Interaksi informal, simulasi, serta pengalaman bersama memungkinkan peserta mulai membangun kepercayaan, menurunkan jarak hierarkis, dan berani mengungkapkan kebingungan maupun refleksi personal. Dalam konteks ini, muncul refleksi penting bahwa **pembentukan “chemistry” antar peserta membutuhkan waktu, intensitas pertemuan, dan ruang interaksi yang berulang.** Proses saling mengenal, bercanda, dan bekerja bersama menjadi fondasi awal bagi kerja sama lintas sektor yang lebih substantif.

“Saya pribadi sangat senang, fasilitatornya ramah dan methodology sudah sangat baik, berikut materi pelatihan yang mudah dimengerti hanya saja butuh beberapa penyesuaian narasi wawancara yang dikondisikan dengan bahasa daerah sasaran penelitian. kemudian dalam pandangan saya proses rangkaian kegiatan terlalu banyak dan waktu lama, mulai dari zoom dan tatap muka, tapi sejauh ini sy rasa baik overall. makasih”

(Refleksi interlokutor laki-laki pada pelatihan tatap muka)

“Pengalaman baru juga buat kita dan supaya bisa bertanya dan tahu apa yang dikeluhkan masyarakat”

(Refleksi interlokutor laki-laki setelah pelatihan tatap muka dan penelitian)

Di dalam struktur birokrasi yang berjenjang, proses partisipatoris juga sangat dipengaruhi oleh dukungan dan sinyal dari pimpinan daerah atau atasan langsung. Temuan menunjukkan bahwa meskipun komunikasi informal telah terbangun, keterlibatan aktif OPD



sering kali tetap bergantung pada arahan, legitimasi, atau dorongan dari pimpinan. Pada beberapa momen ketika respons melambat atau partisipasi terlihat minimal, dukungan eksplisit dari pimpinan daerah terbukti efektif dalam mendorong kembali keterlibatan. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks birokrasi daerah, **legitimasi politik dan administratif bukan sekadar pendukung, melainkan prasyarat** penting bagi keberlangsungan proses partisipatoris.

Di tengah tantangan struktural tersebut, proses ini juga memperlihatkan peluang penting yang memungkinkan partisipasi dapat tumbuh, terutama melalui peran mitra regional. Keterlibatan eLSIL Kie Raha sebagai mitra regional dengan pengalaman lapangan, pemahaman konteks sosial-politik, serta jejaring yang kuat di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam membuka ruang partisipasi sejak awal. Kepercayaan yang telah terbangun sebelumnya antara mitra regional dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal membuat proses *engagement* tidak dimulai dari posisi “orang luar” yang sepenuhnya baru.

Tanpa kehadiran mitra regional yang dipercaya oleh aktor lokal, proses partisipatoris berpotensi menghadapi resistensi, kecurigaan, atau sekadar kepatuhan administratif tanpa keterlibatan bermakna. Dalam konteks ini, **kepercayaan bukanlah hasil instan dari proses penelitian, melainkan juga prasyarat** yang memungkinkan proses partisipatoris berjalan.

Selain aktor, **bahasa, dialek, dan perilaku lokal** juga muncul sebagai faktor penting dalam membentuk kualitas *engagement*. Interlokutor yang mampu menggunakan bahasa lokal, memahami kebiasaan sosial, atau menyesuaikan gaya komunikasi terlihat lebih mudah diterima baik oleh masyarakat maupun aparat desa. Penyesuaian ini membantu mengurangi jarak institusional dan membuka ruang dialog yang lebih jujur, terutama ketika membahas isu sensitif seperti dampak tambang, konflik lahan, atau bantuan yang tidak merata.

“Karena kita bicara dengan bahasa lokal jadi mereka paham apa yang ditanyakan.”

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 1)

“Ketika berbicara dengan bahasa lokal dan bicara dengan bahasa daerah dapat membedakan kedekatan dan kualitas jawaban dari informan. Bicara dengan bahasa daerah mempermudah untuk bercanda dalam konteks lokal. Biasanya ketika sudah bercanda ini bisa men-deescalasi ketegangan yang muncul saat wawancara.”

(Refleksi peneliti laki-laki Dala Institute, pada pengumpulan data di Klaster 2)

Dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah, penggunaan bahasa dan pendekatan yang kontekstual juga memengaruhi respons dan keterbukaan. Jalur formal birokrasi seperti persuratan tetap diperlukan, namun sering kali perlu dilengkapi dengan komunikasi informal dan relasional untuk menjaga kelangsungan partisipasi seperti komunikasi melalui WA. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam konteks birokrasi daerah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sangat relasional.



Peluang lain yang muncul dalam proses partisipatoris adalah cara isu-isu kompleks—seperti transisi energi dan tata kelola mineral—diperkenalkan dan dibingkai. Temuan menunjukkan bahwa **narasi normatif tentang transisi energi cenderung sulit dipahami dan kurang dirasakan urgensinya oleh aktor daerah**, terutama karena isu tersebut sering dipersepsikan berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah. Sebaliknya, penggunaan bukti empiris dan pengalaman konkret terbukti lebih efektif dalam membangun *sense of urgency* dan keterlibatan bersama.

Narasi berbasis biaya eksternalitas, perlambatan ekonomi, serta risiko pascatambang lebih membumi karena berangkat dari realitas yang telah atau sedang dirasakan. Dalam konteks Maluku Utara, pengalaman kolektif seperti kasus Pulau Gebe menjadi rujukan bersama yang memudahkan aktor untuk memahami risiko jangka panjang dan relevansi isu.

“Narasi pascatambang itu lebih kena kalau pakai contoh keluarga, anak-cucu.

Tidak ada perusahaan yang bertahan selamanya.”

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 2)

Proses ini memperlihatkan bahwa **pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*)** lebih efektif dibandingkan diskusi konseptual dalam membangun pemahaman bersama. Ketika aktor pemerintah dan interlokutor terlibat langsung di lapangan, mendengar cerita warga, serta menyaksikan kondisi sosial-ekonomi secara langsung, isu yang sebelumnya abstrak mulai dipahami sebagai persoalan nyata yang menuntut perhatian.

Dengan demikian, refleksi pada subbab ini menunjukkan bahwa proses partisipatoris menghadapi tantangan struktural yang nyata—mulai dari hierarki birokrasi, keterbatasan medium daring, hingga kompleksitas isu lintas kewenangan. Namun, pada saat yang sama, terdapat peluang penting yang dapat dimanfaatkan, terutama melalui kehadiran mitra regional yang dipercaya, penggunaan bahasa dan pendekatan lokal, serta *framing* isu berbasis pengalaman dan bukti empiris. Peluang-peluang inilah yang memungkinkan partisipasi tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi mulai bergerak menuju keterlibatan yang lebih bermakna.

4.2 Partisipasi dan Kemauan Pemerintah: antara Keterlibatan Awal, Kesadaran yang Tumbuh, dan Batas Kepemilikan Proses

Refleksi pada tiga fase awal menunjukkan bahwa proses partisipatoris berhasil memunculkan keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, namun dengan tingkat kemauan dan kepemilikan yang berbeda-beda. Partisipasi pemerintah tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh level jabatan, posisi institusional, serta pengalaman langsung dalam proses penelitian. Fase 1 dan 2 terutama melibatkan pimpinan daerah—Bupati, Kepala Dinas, dan Kepala Bidang—dalam perumusan isu dan arah, sementara Fase 3 lebih banyak dijalankan oleh staf teknis OPD sebagai delegasi peneliti. Perbedaan ini membentuk dinamika kemauan yang tidak selalu linear antara keterlibatan awal dan kesiapan untuk merespons temuan yang tentunya tidak lepas dari relasi kuasa dari struktur pemerintah yang berjenjang.



Kemauan pemerintah untuk *engage* terlihat cukup kuat pada tahap awal, terutama dalam bentuk kehadiran formal, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan penunjukan delegasi. Namun, temuan juga menunjukkan adanya **missing link antar fase** (fase 2 dan 3). Diskusi strategis di level pimpinan lebih banyak berfokus pada *what*—isu prioritas, dokumen perencanaan, dan kerangka besar—sementara staf teknis di lapangan dihadapkan pada pertanyaan *why* dan *how* tanpa keterlibatan penuh dalam proses awal tersebut. Kondisi ini membatasi *ownership* delegasi terhadap keseluruhan proses dan memengaruhi kemampuan delegasi peneliti di lapangan dalam mengeksplorasi dan menyampaikan *probing*.

Perbedaan level jabatan juga memengaruhi cara partisipasi dimaknai. Pada diskusi pengumpulan data ketika seluruhnya merupakan delegasi peneliti, staf teknis menunjukkan antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi, sementara kehadiran staf senior cenderung mengarahkan interaksi menjadi lebih formal dan hati-hati. Hal ini tercermin dalam dinamika pelatihan dan diskusi, di mana sebagian peserta lebih berani berbicara dan berefleksi ketika ruang dianggap aman secara hierarkis.

Meskipun demikian, proses partisipatoris mulai memunculkan **indikasi positif berupa perubahan cara pandang di kalangan interlokutor**. Delegasi OPD yang terlibat langsung dalam pengumpulan data mengalami sendiri proses mendengar dan berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks penelitian kualitatif. Pengalaman ini memicu kesadaran akan adanya kesenjangan antara program yang dirancang dan realitas yang ditemui di lapangan. Beberapa interlokutor mulai mempertanyakan asumsi programatik yang selama ini dianggap telah menjawab kebutuhan masyarakat.

“Saya kan belum pernah turun langsung ke masyarakat tanya-tanya. Ternyata menyenangkan juga bertemu dan interaksi. Kadang kita merasa kenapa masyarakat punya pola pikir seperti ini ternyata karena kurang sosialisasi, jadi perlu lebih terbuka”

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 2)

“Saya heran juga kenapa turun di Desa Lukolamu belum mendapatkan bantuan UMKM mungkin karena persyaratan belum lengkap. Ini Pelajaran untuk perwakilan dinas agar kedepan bisa merubah strateginya.”

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

Kesadaran tersebut tidak selalu mudah dijalankan dalam praktik. Dorongan untuk menjelaskan atau membenarkan program masih muncul, terutama ketika interlokutor membawa identitas institusionalnya ke dalam interaksi dengan warga. Relasi kuasa antara OPD dan masyarakat tetap memengaruhi dinamika lapangan, menciptakan ketegangan antara peran sebagai peneliti dan peran sebagai representasi pemerintah. Namun, seiring waktu, sebagian interlokutor menunjukkan **pergeseran sikap**, dari menjelaskan menuju mendengarkan, dari mengarahkan menuju menggali.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mendengar secara aktif berkembang melalui **praktik berulang dan pendampingan langsung**, bukan hanya melalui pelatihan singkat atau panduan tertulis. Ruang refleksi setelah wawancara dan FGD menjadi penting untuk membantu interlokutor menyadari pola interaksi mereka sendiri—kapan mereka terlalu



cepat menyimpulkan, kapan mereka belum memberi ruang hening, dan kapan posisi institusional mereka masih terlalu dominan.

Kotak 3. Active Listening sebagai salah satu Kompetensi Kunci dalam Penelitian Aksi Partisipatoris

Pengalaman pengumpulan data memperlihatkan bahwa **active listening** (mendengarkan aktif) merupakan kompetensi kunci yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelatihan awal. Kompetensi ini muncul sebagai tantangan mendasar yang memengaruhi kualitas data dan proses partisipatif di lapangan.

Mendengar sebagai Peneliti vs. Menjelaskan sebagai Pejabat

Dalam penelitian kualitatif, active listening mengacu pada kemampuan mendengarkan secara mendalam dengan tujuan memahami pengalaman dan perspektif informan, bukan untuk mengevaluasi, mengoreksi, atau memberikan solusi. Ini berbeda dengan pola komunikasi yang umum dalam birokrasi, di mana pejabat terbiasa menjelaskan kebijakan, mengklarifikasi program, atau memberikan arahan. Dalam konteks PAR, pergeseran dari "menjelaskan" ke "mendengar" bukan sekadar perubahan teknik wawancara, melainkan transformasi peran dan mindset—dari representasi institusi menjadi fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi warga untuk bercerita. Tantangan ini semakin kompleks dalam struktur birokrasi yang hierarkis, di mana kebiasaan institusional dan relasi kuasa memengaruhi cara interlokutor berinteraksi dengan masyarakat.

Pola yang Teridentifikasi di Lapangan

Temuan lapangan menunjukkan beberapa pola yang mencerminkan keterbatasan dalam active listening:

- **Intervensi dan mengarahkan diskusi:** Beberapa interlokutor cenderung mengintervensi ketika informan memberikan jawaban yang dianggap tidak sesuai ekspektasi. Seorang peneliti mencatat bahwa interlokutor "kurang sabar dalam mendengarkan sehingga sesekali mengintervensi atau mengarahkan (tidak netral). Tampak juga emosi ketika responden pasif." Dalam kasus lain, ketika fasilitator FGD tidak puas dengan respons peserta, "beliau lebih banyak menyimpulkan isi gambar tersebut sehingga sesi ini selesai kurang dari 10 menit dan peserta tidak bicara satu persatu."
- **Memberikan penjelasan atau justifikasi program:** Kecenderungan untuk menjelaskan program muncul berulang kali, terutama ketika warga menyampaikan keluhan. Seorang interlokutor di Klaster 1 dicatat "bahasanya memang masih kaku dan memberikan banyak komentar tambahan terkait pertanyaan," sementara yang lain "belum menguasai teknis FGD bahwa tujuannya mendengarkan pandangan peserta, bukan memberikan sosialisasi/pendidikan."
- **Menyimpulkan terlalu cepat dan kurang probing:** Dalam beberapa wawancara, interlokutor belum memberikan ruang yang cukup bagi informan untuk mengembangkan jawaban atau merefleksikan pengalaman mereka. "Meskipun sudah sangat baik, pada beberapa momen, [interlokutor] sebagai fasilitator kurang memberikan waktu bagi peserta lain untuk menanggapi."
- **Ketegangan emosional yang terbawa:** Beberapa interlokutor mengalami kesulitan mengelola emosi, terutama di hari pertama. "Di hari pertama proses pengambilan wawancara [interlokutor] terlalu tegang, akibatnya emosinya itu terbawa ke masyarakat." Ketegangan ini memengaruhi kenyamanan informan dan kualitas interaksi.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa pergeseran peran membutuhkan tidak hanya pemahaman teknis, tetapi juga kesiapan psikologis untuk melepaskan identitas institusional dan membuka diri pada pengalaman yang mungkin tidak nyaman atau bertentangan dengan asumsi awal.

Pembelajaran untuk Pelatihan Mendatang

Pengalaman ini menegaskan perlunya **pemberian materi eksplisit tentang active listening** sebagai fondasi metodologis, bukan hanya asumsi bahwa peserta sudah memahaminya. Materi ini perlu mencakup dimensi teknis (teknik probing, parafrase, mengelola hening) maupun dimensi relasional (kesadaran akan posisi kuasa, empati tanpa simpati berlebihan, dan kemampuan menanggukkan judgment).

Lebih jauh lagi, diperlukan **intervensi yang lebih mendalam pada aspek psikologis dan mindset**, termasuk pendekatan seperti **Theory U** yang menekankan pada proses "presencing"—kemampuan untuk hadir sepenuhnya, melepaskan asumsi dan pola lama (letting go), serta membuka diri pada kemungkinan baru (letting come). Pendekatan ini relevan karena tantangan utama interlokutor bukan pada tidak tahu cara bertanya, melainkan pada kesulitan melepaskan identitas sebagai pejabat dan membuka ruang bagi suara



yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan narasi institusional.

Ke depan, pelatihan perlu dirancang dengan elemen-elemen berikut:

- **Sesi khusus tentang active listening**, mencakup definisi, prinsip, dan perbedaannya dengan pola komunikasi birokrasi, disertai dengan latihan mendengarkan tanpa respons verbal.
- **Simulasi intensif dengan umpan balik langsung** mengenai pola interaksi, termasuk kapan interlokutor terlalu cepat menyimpulkan atau membawa agenda institusional.
- **Latihan refleksi diri dan kesadaran posisi (positionality)**, untuk membantu interlokutor mengenali bagaimana identitas dan peran institusional mereka memengaruhi cara mereka mendengar dan merespons.
- **Sesi pengelolaan emosi**, terutama ketika mendengar kritik terhadap program pemerintah atau menghadapi informan yang enggan berbicara.
- **Pendampingan lapangan yang lebih intensif**, terutama pada fase awal pengumpulan data, untuk memberikan umpan balik real-time dan memperkuat praktik mendengarkan.
- **Penekanan pada nilai "tidak tahu" dan "rasa ingin tahu"**, untuk mendorong interlokutor mendekati warga dengan sikap belajar, bukan dengan asumsi bahwa mereka sudah memahami persoalan.

Active listening bukan kemampuan yang dapat dikuasai dalam satu pelatihan singkat, melainkan kompetensi yang tumbuh melalui praktik berulang, refleksi kritis, dan kesediaan untuk melepaskan kebiasaan institusional. Pembelajaran ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas partisipasi dan relevansi data pada fase-fase penelitian selanjutnya

Proses partisipatoris juga membuka **ruang pembelajaran kritis terhadap program dan pendekatan** yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah seperti terlihat pada Gambar 4. Keterlibatan langsung dalam pengumpulan data dan interaksi dengan masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara asumsi kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Sejumlah delegasi peneliti menyadari bahwa isu yang selama ini dipahami sebagai persoalan teknis sektoral ternyata memiliki dimensi sosial, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola yang saling berkelindan.

Gambar 4. Kejutan Pembelajaran yang Diutarakan Delegasi Peneliti



Pengalaman lapangan mengungkap bahwa intervensi yang bersifat rutin atau berbasis prosedur—seperti bantuan pertanian, pengelolaan lingkungan, perumahan, maupun layanan dasar—tidak selalu selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bahkan berpotensi tidak efektif karena salah sasaran. Dalam beberapa kasus, masalah utama bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada **kapasitas pengelolaan, pemahaman konteks lokal, serta kesesuaian jenis intervensi** dengan persoalan yang



dihadapi warga. Pembelajaran ini mendorong refleksi lintas sektor bahwa pendekatan pembangunan yang fragmentaris dan berbasis asumsi perlu ditinjau ulang, serta menegaskan pentingnya proses mendengar dan memahami pengalaman warga sebagai dasar untuk merumuskan intervensi yang lebih relevan, adaptif, dan berkeadilan.

"Hal yang baru didengar banyak sekali, karena di dinas biasanya turun menangani sampah. Padahal ternyata banyak masalah di lapangan masalah lahan, batas desa."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 1)

"Hari ini kita dapat informasi baru terkait dengan Kesehatan penyakit HIV AIDS, tadi turun ke puskesmas. Pengaruh tambang ini salah satunya peningkatan HIV AIDS disini."

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

"Saya kaget dengan seng di rumah dan kos-kosan, biasanya bisa 10 tahun. Ternyata 2 tahun sudah bocor itu hal yang serius."

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

"Ternyata perlu ada peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 2)

"Yang dibutuhkan pupuk perangsang tapi yang dikasuh pupuk penyubur. Produktif tidak ada, ini lebih ke konsumtif."

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 3)

Dalam konteks ini, kemauan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan suara masyarakat tampak sebagai **proses yang bertahap**. Proses partisipatoris pada fase awal lebih efektif dalam menggeser cara pemerintah **memahami masalah, membangun bahasa bersama, dan menumbuhkan sensitivitas** terhadap pengalaman warga, dibandingkan dalam mendorong perubahan kebijakan atau praktik secara langsung. Hal ini sejalan dengan posisi penelitian yang masih berada pada tahap awal, di mana temuan bersifat *emerging* dan berfungsi sebagai dasar pembelajaran adaptif.

"Pada saat melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan FGD ada rasa antusias, prihatin, empati dan ada perasaan sedih ketika melihat kondisi yang dialami masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang, khususnya Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai dan Lukolamo. Apa yang mereka sampaikan baik wawancara maupun diskusi, ada harapan yang benar-benar mereka sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan atau menangani masalah sampah yang berserakan, kualitas air dan penanggulangan banjir entah itu lewat program atau kebijakan pemerintah daerah agar supaya menyelesaikan masalah yang dirasakan selama ini."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 1)



"Ternyata kesejahteraan tidak selalu diukur dari uang. Ada kerinduan akan ketenangan jiwa dan raga."

(Refleksi interlokutor perempuan pada pengumpulan data di Klaster 3)

Refleksi ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak serta-merta menghasilkan komitmen perubahan kebijakan, tetapi membuka ruang bagi **perubahan cara pandang dan relasi pengetahuan** di dalam institusi pemerintah. Perubahan di level pemahaman, empati, dan artikulasi masalah merupakan capaian awal yang signifikan, sekaligus prasyarat bagi kemungkinan respons kebijakan yang lebih relevan pada fase-fase berikutnya.

4.3 Relevansi terhadap Kebutuhan Nyata Masyarakat: dari asumsi kebijakan ke pengalaman hidup warga

Proses partisipatoris pada fase pengumpulan data memperlihatkan bahwa **relevansi kebijakan** terhadap kebutuhan masyarakat tidak dapat diasumsikan dari keberadaan program atau capaian indikator semata. Relevansi justru diuji ketika pengalaman hidup warga—yang sering kali tidak terdokumentasi secara formal—masuk ke dalam ruang refleksi pemerintah. Dalam konteks ini, PAR berfungsi sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara logika perencanaan berbasis data makro dan realitas mikro yang dialami masyarakat di wilayah lingkaran tangkapan.

"Pengalaman pertama turun langsung bikin saya benar-benar tahu kondisi masyarakat. Ini pelajaran besar."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 3)

"....kurangnya informasi dari pemerintah desa ke masyarakat."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 2)

Salah satu temuan paling menonjol adalah adanya **articulation gap antara desain program dan pengalaman warga**. Banyak interlokutor menyadari bahwa persoalan yang dianggap "sudah ditangani" di tingkat kebijakan ternyata masih dirasakan sebagai masalah mendasar oleh masyarakat. Bantuan dan layanan dasar—terutama air bersih, perumahan, kesehatan, dan dukungan ekonomi—muncul berulang kali sebagai contoh kebijakan yang secara administratif ada, tetapi secara substantif belum dirasakan merata atau tepat sasaran. Pengalaman ini menantang asumsi bahwa masalah utama terletak pada ketiadaan program, dan menggeser perhatian pada kualitas implementasi, pendataan, dan pengawalan di tingkat tapak.

"Soal sampah tadi saya diskusi dengan bu bendahara, mereka bilang itu tidak ada bantuan dari pemerintah truk sampah dan ditarik ulang oleh pemda. Menurut saya itu mengejutkan, kenapa ditarik oleh pemerintah. "

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

"Masalah penampungan yang disediakan pemerintah yang sudah dikembalikan ke daerah penampung air kenapa belum direalisasikan. Janjinya desember tapi sampai saat ini belum ada. Penampung nya sudah ada. Saya kaget mendengar ini kenapa penampungnya ada kenapa belum ada realisasinya."



(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

Dalam proses mendengar langsung cerita warga, interlokutor juga memperoleh banyak informasi baru yang sebelumnya berada di luar radar OPD masing-masing. Dampak kesehatan seperti penyakit kulit akibat air tercemar, peningkatan risiko HIV/AIDS, serta kerusakan rumah dan fasilitas akibat debu tambang memperluas pemahaman bahwa dampak pertambangan bersifat lintas sektor dan saling berkelindan. Temuan ini mendorong kesadaran bahwa **pendekatan sektoral yang terpisah-pisah tidak memadai** untuk merespons kompleksitas masalah di wilayah tambang, dan bahwa relevansi kebijakan bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan isu-isu tersebut secara lintas sektor.

"Untuk isu seperti HIV/AIDS ini tidak bisa satu dinas. Ini butuh kerja sama lintas sektor."

(Refleksi delegasi peneliti perempuan pada pengumpulan data di Klaster 3)

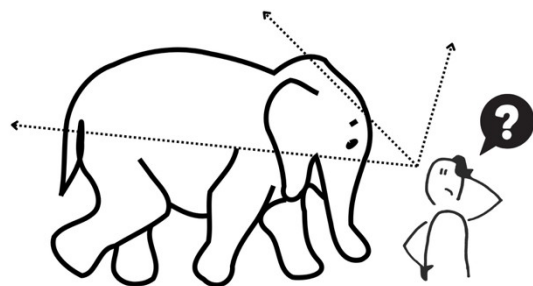
Pengalaman lapangan juga mengungkap **dimensi keadilan prosedural** yang selama ini kurang terlihat dalam diskursus kebijakan. Banyak warga tidak mengetahui sumber bantuan, mekanisme penyaluran, maupun peran perusahaan dalam program CSR dan PPM. Ketertutupan informasi, proses pendataan yang bias, serta persepsi bahwa bantuan hanya menjangkau "orang dalam" memicu rasa ketidakadilan dan kecurigaan. Bagi interlokutor, temuan ini memperjelas bahwa persoalan utama bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada transparansi, komunikasi, dan mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga memahami serta mengakses haknya secara adil.

Kotak 4. Elephant in the Room: Keterbukaan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengumpulan data di lapangan, proses partisipatoris menghadapi tantangan mendasar berupa ketakutan dan keraguan masyarakat untuk berbicara secara terbuka. Dalam sejumlah diskusi terkhusus dan wawancara, warga menunjukkan sikap enggan terlibat aktif, kurang fokus dalam diskusi, atau hanya menyampaikan jawaban normatif. Situasi ini tercermin dalam catatan lapangan di mana "*peserta terlihat hanya mengikuti arahan dari mereka yang lebih dominan*", sementara sebagian lainnya "*acuh tak acuh, ada yang sibuk main HP, ada yang mengurus anak, dan tidak memberi perhatian penuh*". Dalam konteks lain, interlokutor mencatat bahwa "*ketika ada yang mau terbuka diajak diskusi dan usulan-usulan itu keluar semua, tapi di awal banyak yang tertutup dan curiga*".

Meskipun temuan ini belum dapat digeneralisasi, proses lapangan mengindikasikan adanya **kejujuran partisipasi (participation fatigue)**, terutama di wilayah yang telah lama menjadi lokasi berbagai program dan penelitian. Kejujuran ini tampak bukan semata akibat kurangnya kapasitas atau minat, melainkan terbentuk dari pengalaman sosial yang berulang, di mana keterlibatan sebelumnya tidak diikuti oleh perubahan nyata atau umpan balik yang jelas. Seorang informan menyampaikan bahwa "*orang-orang tidak mau diundang rapat walaupun dikasi uang duduk karena kecewa masukannya tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah dan perusahaan*", sementara yang lain menyatakan secara ketus bahwa diskusi semacam ini "*sia-sia karena sudah sering bahas dampak tambang tapi tidak ada solusi*". Sikap tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan yang membentuk kehati-hatian, apatisme, dan jarak emosional terhadap proses partisipatif.

Di luar kejujuran, tantangan lain yang lebih mengakar adalah **ketidakterbukaan informasi**, khususnya terkait bantuan, program desa, dan peran aktor pemerintah maupun perusahaan. Interlokutor mencatat bahwa "*mereka sadar pemerintah desa*



*tidak transparan ke masyarakat”, dan bahwa aparat desa yang diwawancarai pada pagi hari “tidak terbuka di forum FGD siang hari”. Ketakutan juga muncul di kalangan penerima bantuan, yang enggan mengakui telah menerima dukungan karena khawatir memicu kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, proses identifikasi penerima bantuan dipersepsikan tidak adil dan sarat *preferential treatment*, sehingga baik penerima maupun non-penerima sama-sama berada dalam posisi tidak aman untuk berbicara. Beberapa jawaban responden menunjukkan kecemasan dan kehati-hatian berlebih, terutama karena “belum ada pemerataan” dan adanya kekhawatiran akan ketersinggungan relasi sosial di tingkat desa.*

Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa ketidakterbukaan informasi berfungsi sebagai “**gajah di pelupuk mata**” dalam proses partisipatoris—hadir, besar, dan memengaruhi kualitas partisipasi, namun jarang dibicarakan secara eksplisit.

Selain itu, proses partisipatoris juga memunculkan **pergeseran cara pandang** interlokutor terhadap makna kesejahteraan dan pembangunan. Banyak refleksi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akibat tambang tidak selalu sejalan dengan perbaikan kualitas hidup. Warga menyampaikan keluhan tentang polusi, keterbatasan ruang hidup, menurunnya kualitas relasi sosial, serta hilangnya rasa aman dan ketenangan. Pengalaman ini memperluas pemahaman interlokutor bahwa pembangunan tidak dapat direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi semata, melainkan perlu mempertimbangkan dimensi sosial, kesehatan, dan keberlanjutan jangka panjang.

“Di provinsi yang katanya paling kaya dan bahagia, ternyata kondisi masyarakatnya seperti ini.”

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 1)

Isu pascatambang menjadi contoh penting bagaimana relevansi kebijakan mulai diuji melalui proses partisipatoris. Banyak warga—termasuk pekerja tambang—mengakui belum pernah memikirkan masa depan setelah tambang berhenti beroperasi. Ketika pertanyaan ini diajukan dalam wawancara dan FGD, muncul kebingungan sekaligus kesadaran baru tentang tingginya ketergantungan ekonomi terhadap tambang. Bagi interlokutor, momen ini menegaskan bahwa absennya isu pascatambang dalam diskursus publik bukan karena warga apatis, melainkan karena minimnya informasi dan ruang dialog.

“Pertanyaan soal pascatambang itu bikin masyarakat memutar kepala. Baru sadar betapa bergantungnya hidup mereka ke tambang.”

(Refleksi peneliti Dala Institute pada pengumpulan data di Klaster 3)

“Saya tertarik dengan fasilitasi FGD yang dilakukan karena bisa mendorong peserta untuk berdiskusi dan membuat ide-ide lebih banyak keluar. Secara tidak langsung peserta yang tidak tahu apa-apa soal dampak tambang ini juga ikut paham karena ngobrol dengan yang lain.”

(Refleksi delegasi peneliti laki-laki pada pengumpulan data di Klaster 2)

Secara keseluruhan, refleksi pada subbab ini menunjukkan bahwa relevansi kebijakan tidak hadir secara otomatis melalui partisipasi, tetapi tumbuh secara bertahap ketika pengalaman warga mulai memengaruhi cara pemerintah memahami masalah. PAR pada tahap ini belum menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret, namun telah membuka ruang penting bagi **reframing isu**—dari persoalan teknis dan sektoral menuju pemahaman



yang lebih kontekstual, lintas sektor, dan berakar pada pengalaman hidup masyarakat. Relevansi kebijakan, dengan demikian, muncul bukan sebagai hasil instan, melainkan sebagai proses yang sedang dibangun melalui praktik mendengar, refleksi, dan pembelajaran bersama.

4.4 Pembelajaran Metodologis PAR: antara kualitas riset, kualitas partisipasi, dan realitas birokrasi

Implementasi penelitian aksi partisipatoris (PAR) pada tiga fase awal proyek ini menghasilkan pembelajaran metodologis yang penting, terutama terkait ketegangan antara upaya membangun kapasitas partisipatif dan tuntutan kualitas riset kualitatif. Proses ini memperlihatkan bahwa PAR bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan praktik sosial yang beroperasi di dalam struktur birokrasi, relasi kuasa, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang nyata.

Salah satu pembelajaran utama adalah adanya **trade-off** antara kualitas partisipasi dan konsistensi kualitas data pada tahap awal. Pelibatan staf OPD sebagai delegasi peneliti membuka ruang pembelajaran yang bermakna—terutama melalui pengalaman langsung mendengar warga—namun juga menghadirkan variasi signifikan dalam kemampuan melakukan wawancara, fasilitasi FGD, pencatatan, dan probing kualitatif. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman riset, kenyamanan reflektif, serta adaptasi terhadap metode dan teknologi memengaruhi kedalaman dan konsistensi data yang dihasilkan.

Pembelajaran ini menegaskan bahwa dalam konteks birokrasi daerah, peran delegasi OPD lebih realistis dipahami sebagai **co-learner dan interlokutor, bukan peneliti penuh** dengan kontrol metodologis yang seragam. Upaya menjaga kualitas riset dilakukan melalui pelatihan bertahap, simulasi, pendampingan lapangan, serta proses coding dan analisis lanjutan oleh tim peneliti. Dengan demikian, kualitas data tidak sepenuhnya bergantung pada performa individu di lapangan, tetapi pada desain kolektif yang mengombinasikan pembelajaran partisipatif dan mekanisme pengendalian mutu.

Pengalaman pelatihan juga menunjukkan bahwa **medium pembelajaran** sangat menentukan efektivitas PAR. Pelatihan daring berfungsi penting sebagai mekanisme awal untuk membangun legitimasi proses dan menyampaikan kerangka konseptual penelitian, namun terbatas dalam membentuk pemahaman praktis dan perubahan peran. Sebaliknya, pelatihan tatap muka terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan, memperjelas peran fasilitator dan pewawancara, serta mendorong refleksi bersama melalui simulasi dan diskusi langsung. Interaksi tatap muka memungkinkan peserta menyadari perbedaan antara klarifikasi program dan eksplorasi pengalaman warga, sebuah pergeseran kunci dalam penelitian kualitatif partisipatoris.

Implementasi PAR juga memperlihatkan bahwa bagi banyak staf OPD, keterlibatan dalam penelitian dipersepsikan sebagai **add-on di luar tugas utama**. Persepsi ini memengaruhi komitmen waktu dan kesiapan mengikuti proses secara mendalam, terutama ketika kegiatan berlangsung bersamaan dengan agenda dinas dan tuntutan administratif. Namun, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ketika delegasi mulai merasakan manfaat langsung—baik dalam memahami kondisi masyarakat maupun merefleksikan



praktik kerja mereka sendiri—motivasi intrinsik dapat tumbuh dan mendorong keterlibatan yang lebih bermakna.

Pembelajaran metodologis lainnya berkaitan dengan etika dan **peran ganda interlokutor**. Dalam beberapa situasi, delegasi OPD masih membawa kebiasaan institusional ke dalam proses wawancara, seperti kecenderungan menjelaskan program, mengklarifikasi kebijakan, atau menyisipkan agenda monitoring. Praktik ini berpotensi membatasi ruang warga untuk menyampaikan pengalaman secara bebas dan menimbulkan kebingungan peran. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penekanan berulang pada etika penelitian, *informed consent*, serta kejelasan posisi interlokutor sebagai pendengar pengalaman warga, bukan representasi institusi.

Proses ini juga menunjukkan bahwa membangun kapasitas partisipatif membutuhkan **waktu yang lebih panjang** dibandingkan siklus proyek yang direncanakan. Pergeseran peran dari “pelaksana program” menjadi “fasilitator dialog” tidak terjadi secara instan, melainkan melalui praktik berulang, refleksi, dan umpan balik. Dalam konteks ini, keberhasilan PAR tidak diukur dari kesempurnaan implementasi metode, melainkan dari kemampuan proses untuk membuka ruang belajar, menyadari keterbatasan, dan menyesuaikan pendekatan secara adaptif.

Selain itu, **aspek teknis** yang tampak sederhana—seperti kelengkapan catatan lapangan, materi pelatihan yang mudah dipahami, serta panduan praktis yang ringkas—ternyata sangat menentukan keberhasilan proses. Ketika materi terlalu konseptual atau padat, peserta cenderung kembali ke pola kerja prosedural. Sebaliknya, materi yang kontekstual dan aplikatif membantu meningkatkan kepercayaan diri interlokutor dalam menjalankan peran mereka di lapangan.

Secara keseluruhan, pembelajaran metodologis dari implementasi PAR pada fase awal ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatoris bukanlah jalan pintas untuk menghasilkan data atau perubahan kebijakan yang cepat. PAR bekerja paling efektif sebagai **proses bertahap** yang menggabungkan pembelajaran, pendampingan, dan adaptasi kontekstual. Kejujuran terhadap keterbatasan—baik metodologis maupun institusional—justru menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas proses dan memperkuat kontribusi PAR pada fase-fase selanjutnya.



Implikasi ke Depan

Refleksi atas tiga fase awal menunjukkan bahwa kontribusi utama proses partisipatoris pada tahap ini bukan terletak pada perubahan kebijakan yang langsung terlihat, melainkan pada pergeseran cara memahami masalah, bahasa yang digunakan untuk membicarakannya, serta aktor-aktor yang mulai terhubung dalam satu ruang pembelajaran bersama. Oleh karena itu, implikasi ke depan perlu dibingkai secara realistis sebagai upaya **mengonsolidasikan fondasi**, bukan mempercepat hasil yang belum siap secara institusional.

1. Pertama, strategi keterlibatan ke depan perlu secara sadar dirancang **lintas level jabatan**, bukan hanya lintas sektor. Temuan menunjukkan adanya *missing link* antara fase perumusan isu di level pimpinan dan fase implementasi di level staf. Tanpa mekanisme penghubung yang lebih sistematis, staf akan terus berhadapan dengan pertanyaan *why* dan *how* tanpa kepemilikan penuh terhadap arah kebijakan yang dibahas di awal. Implikasi praktisnya adalah perlunya format engagement yang memungkinkan interaksi berulang antara pimpinan dan staf—meskipun dalam bentuk terbatas—untuk menjaga kesinambungan pemahaman dan ekspektasi.
2. Kedua, proses partisipatoris ke depan perlu mengombinasikan secara strategis **medium daring dan luring**, dengan kesadaran bahwa keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pelibatan daring efektif untuk legitimasi awal, koordinasi, dan penyampaian kerangka besar, tetapi tidak cukup untuk membangun kepercayaan, refleksi kritis, atau perubahan cara pandang. Sebaliknya, pertemuan tatap muka dan keterlibatan lapangan terbukti lebih efektif untuk pembelajaran berbasis pengalaman, namun membutuhkan sumber daya lebih besar. Implikasinya bukan memilih salah satu, melainkan mengalokasikan fungsi yang jelas pada masing-masing medium.
3. Ketiga, temuan menunjukkan perlunya **ruang aman dan berkelanjutan** untuk suara masyarakat masuk ke dalam diskursus kebijakan, bukan hanya sebagai input satu kali. Proses PAR membuka artikulasi isu-isu yang sebelumnya tidak terdengar—bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak memiliki kanal yang aman dan dipercaya. Ke depan, implikasinya bukan sekadar memperbanyak forum, tetapi memastikan bahwa mekanisme partisipasi tidak memperkuat ketimpangan relasi kuasa yang sudah ada, serta tidak membebani warga dengan ekspektasi solusi instan yang berada di luar kendali mereka.
4. Keempat, ekspektasi terhadap perubahan kebijakan perlu dijaga tetap **proporsional dengan fase dan konteks**. Temuan menunjukkan bahwa dampak paling nyata dari proses ini berada pada level pemahaman, bahasa kebijakan, dan kesadaran lintas sektor—bukan pada pergeseran anggaran atau regulasi dalam jangka pendek. Oleh karena itu, implikasi strategisnya adalah menempatkan fase-fase berikut sebagai ruang konsolidasi bukti, pendalaman isu prioritas, dan penguatan kapasitas aktor kunci, alih-alih menekan hasil kebijakan yang prematur.

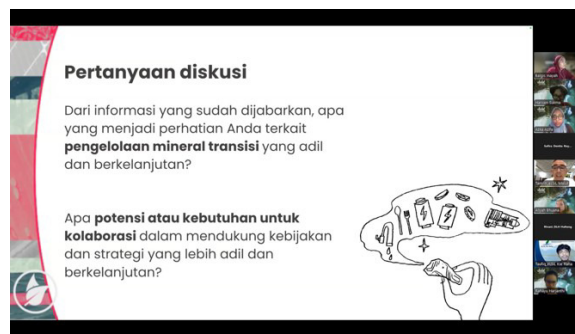
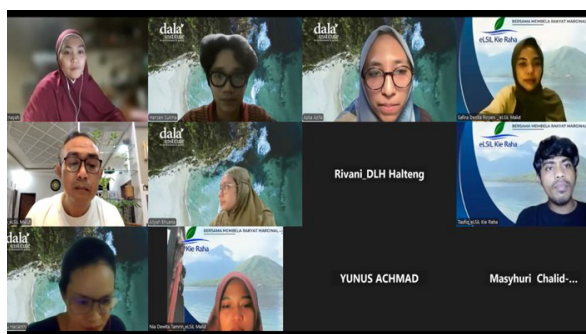
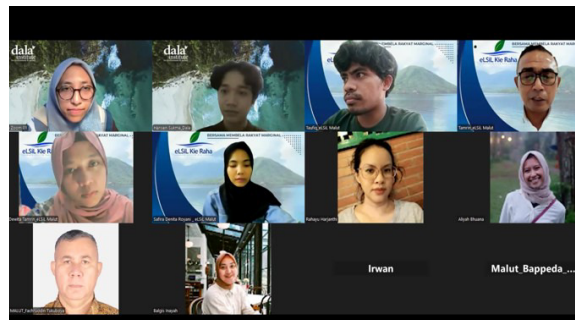
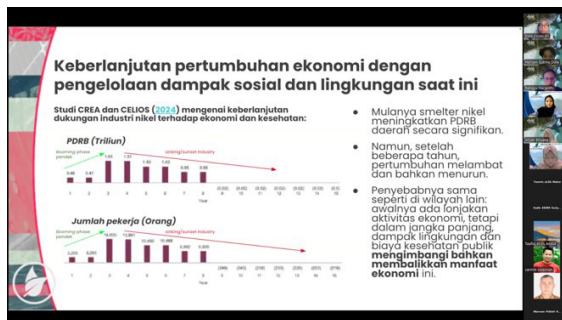
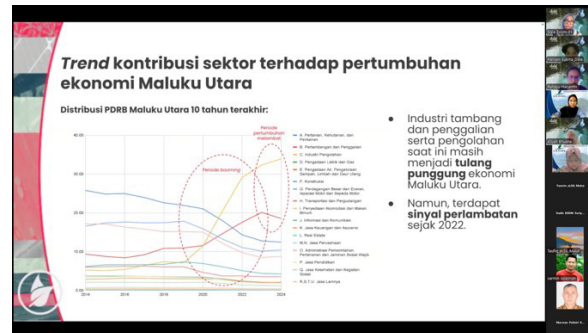
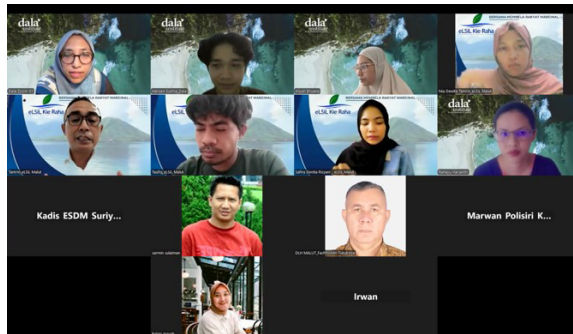


Akhirnya, proses ini menegaskan bahwa PAR dalam konteks tata kelola sumber daya dan energi bukanlah intervensi cepat, melainkan **investasi proses**. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan menjaga kepercayaan, membaca momentum politik, dan menyesuaikan desain partisipasi dengan realitas birokrasi dan sosial yang dinamis. Implikasi ke depan bukan terletak pada mempercepat langkah, tetapi pada memastikan bahwa langkah selanjutnya tetap berpijak pada pembelajaran yang telah diperoleh, dengan arah yang jelas dan ekspektasi yang realistis.

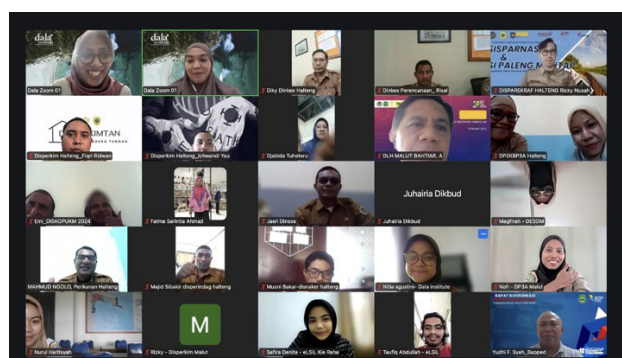
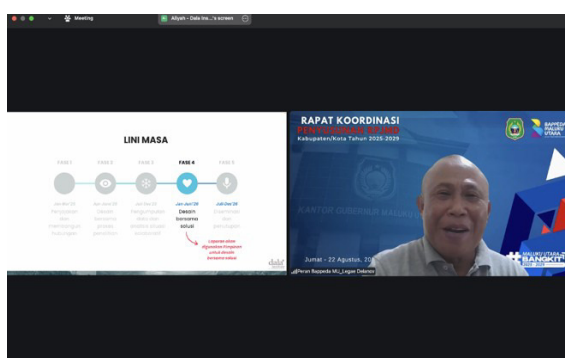
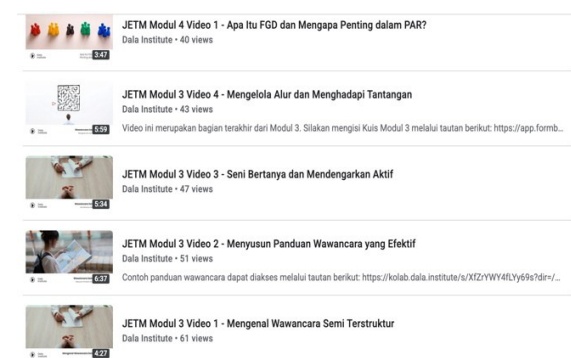
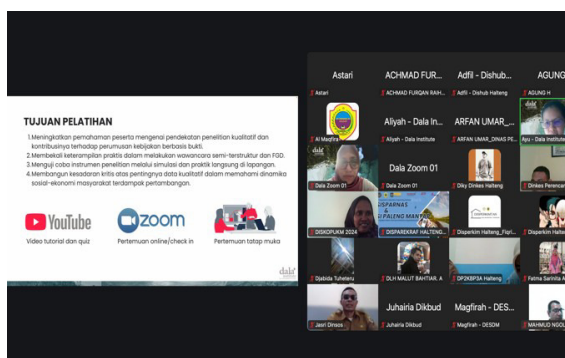


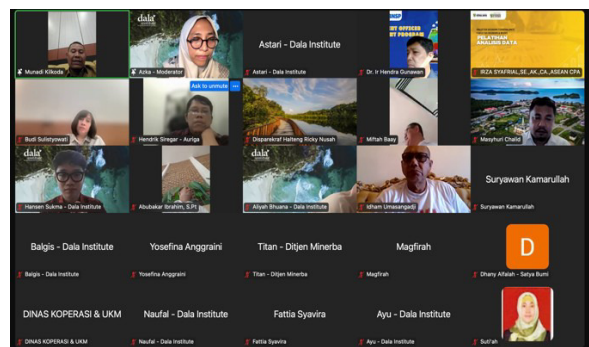
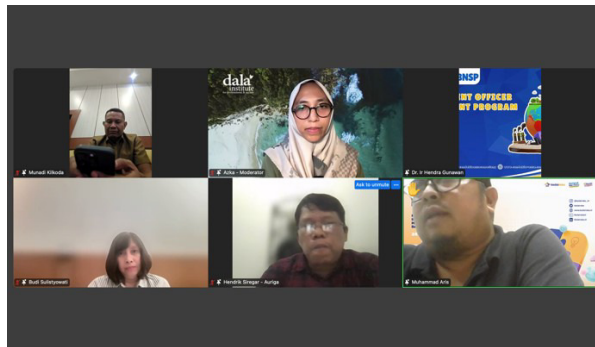
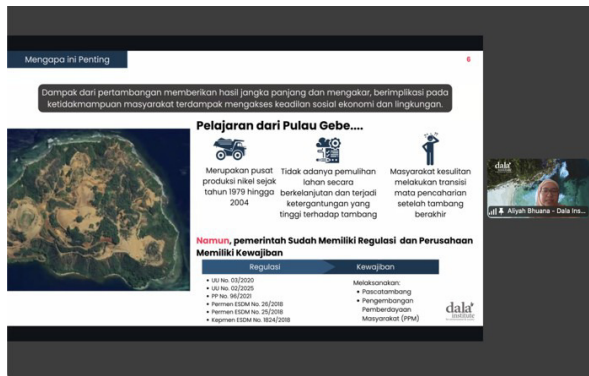
Dokumentasi Kegiatan

Fase 1: Penjajakan dan Pembangunan Hubungan

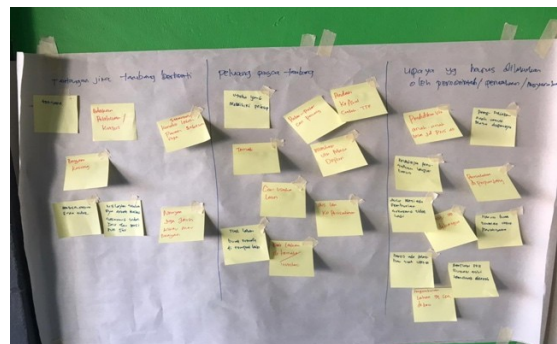


Fase 2: Penyusunan Desain Penelitian Bersama





Fase 3: Pengumpulan Data dan Analisis Situasi Kolaboratif





Referensi

Cornish, F., Gillespie, A., & Zittoun, T. (2023). Participatory action research. Dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.

Fals Borda, O. (1991). Some basic ingredients. Dalam O. Fals Borda & M. A. Rahman (Eds.), *Action and knowledge: Breaking the monopoly with participatory action research* (hlm. 3–12). Apex Press.

Hall, B. L., Tandon, R., & Tremblay, C. (2017). Strengthening community–university research partnerships: Global perspectives. University of Victoria & PRIA.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.

Lapasa, A. P., & Azhar, N. Z. (2025). Kebijakan publik melalui lensa etnografi: Menggali dinamika sosial melalui kerangka tahapan kebijakan Michael Howlett. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 20–39. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.67842>

Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Unesa University Press.

Stringer, E. T. (2014). *Action research* (4th ed.). SAGE Publications.

